

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**



OLEH

**RISMAYANTI
NIM: 2020203870231005**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2025 M /1446 H

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KUPA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**



OLEH

**RISMAYANTI
NIM. 2020203870231005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2025 M/ 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Upaya
Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Kupa
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Rismayanti

NIM : 2020203870231005

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-1763/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.

NIP : 198109072009012005

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M. Fil.I.

NIP : 197607132009121002

Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M. Hum
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Upaya
Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Kupa
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Rismayanti

NIM : 2020203870231005

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-1763/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.

NIP : 198109072009012005

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M. Fil.I.

NIP : 197607132009121002

(.....)
(.....)

Mengetahui,



Dr. A. Nurhidam, M. Hum

NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari segi akademis maupun teknis. Namun, berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat diatasi dan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Harisman dan Ibunda Fatmawati tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dibalik keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini, ada banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. dan Dr. Muhiddin Bakri, Lc. M.Fil.I. selaku pembimbing I (pertama) dan pembimbing II (dua), atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

1. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Prepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Dr. A. Nurkidam, M. Hum. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak Afidatul Asmar, M.Sos. sebagai Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis selaku mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Dr.Hj. Sitti Aminah, M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dan dukungan serta bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepala Desa Kupa dan seluruh perangkat desa, yang tak hanya menyediakan data dan informasi tetapi juga memberi saya pengalaman berharga dalam memahami realitas kehidupan nelayan di Desa Kupa.
8. Para Nelayan di Desa Kupa, yang dengan terbuka berbagi cerita dan pengalaman hidup mereka, serta memberikan gambaran nyata dari isu yang diteliti.
9. Keluarga saya tercinta, yang selalu menjadi tiang penyangga dan sumber kekuatan, tanpa mereka saya mungkin tidak mencapai tahap ini.
10. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, yang selalu ada disisi penulis, menjadi tempat berbagi, berdiskusi, hingga tertawa ditengah kepenatan penelitian ini.

Meskipun setiap prosesnya mengajarkan penulis banyak hal, penulis menyadari bahwa hasil akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Ada banyak ruang untuk perbaikan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik serta saran yang dapat memberikan nilai tambah bagi karya ini.

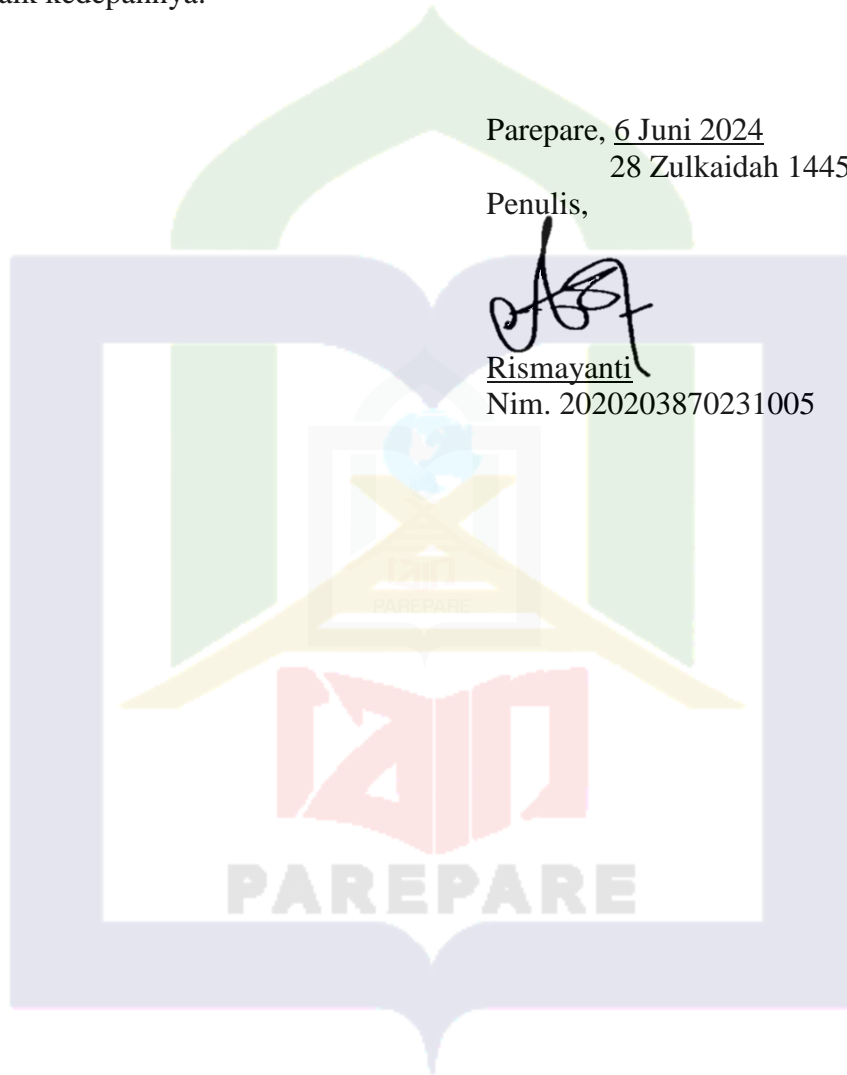
Akhir kata, penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi tugas akhir formalitas, melainkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia akademis. Semoga skripsi ini bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya, serta membantu pembangunan program pemberdayaan masyarakat yang lebih baik kedepannya.

Parepare, 6 Juni 2024
28 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



Rismayanti
Nim. 2020203870231005



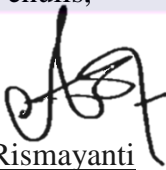
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rismayanti
Nim : 2020203870231005
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 25 Maret 2003
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Upaya
Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Kupa
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Juni 2024
28 Zulkaidah 1445 H
Penulis,



Rismayanti
Nim. 2020203870231005

ABSTRAK

RISMAYANTI, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Nurhikmah dan Muhiddin Bakri).

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi keluarga nelayan di Desa Kupa. Fokus utama penelitian ini adalah memahami upaya pemberdayaan, kendala yang dihadapi, serta dampak program terhadap ekonomi keluarga nelayan. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan pemerintah desa, penyuluh perikanan, dan beberapa nelayan sebagai informan. Analisis data dilakukan berdasarkan teori pemberdayaan dan teori partisipasi, yang memandu evaluasi pada proses dan hasil pemberdayaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan, yang meliputi pelatihan teknis dan bantuan peralatan tangkap, telah berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pendapatan sebagian nelayan. Namun, kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya pelibatan nelayan dalam tahap perencanaan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern menghambat optimalisasi hasil. Dari perspektif teori pemberdayaan, program ini mendukung peningkatan kapasitas individu, tetapi belum menyeluruh karena distribusi sumber daya yang tidak merata. Sementara itu, teori partisipasi menyoroti kurangnya keterlibatan aktif nelayan, yang mengakibatkan program tidak selalu sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan nelayan dalam setiap tahap pemberdayaan dan pemerataan distribusi bantuan untuk memastikan dampak ekonomi yang lebih merata. Dengan pendekatan partisipatif yang lebih kuat, program diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga nelayan di Desa Kupa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Ekonomi Keluarga, Nelayan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN <i>TRANSLITERASI</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Pemberdayaan	12
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	14
3. Teori Partisipasi	27
4. Konsep Masyarakat Nelayan	35
5. Ekonomi Keluarga	39
C. Kerangka Konseptual	41
D. Kerangka Pikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Fokus Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	53
F. Uji Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	59
2. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	64
3. Dampak Pemberdayaan Terhadap Ekonomi Keluarga	67
B. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	78
B. Saran atau Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kupa	31
3.2	Jumlah Kepala Keluarga Desa Kupa	33
3.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kupa	37
3.4	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kupa	38
3.5	Sarana dan Prasarana Desa Kupa	39

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Keterangan
1	Surat Penetapan pembimbing	Terlampir
2	Surat izin melakukan penelitian dari kampus	Terlampir
3	Surat izin penelitian dari pemerintah	Terlampir
4	Surat keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
5	Pedoman wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biodata penulis	Terlampir

PEDOMAN *TRANSLITERASI*

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan trnasliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, *transliterasinya* berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel *Transliterasi* Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, *transliterasinya* berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel *Transliterasi* Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ / اِيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
يِيْ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُوْ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

لَيْقَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha). Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
فَاضِلَةُ الْمَدِينَةِ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia *litransliterasi* seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي	:	<i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)
---------	---	---

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
 الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
 النَّوْءُ : *Al-nau*
 شَيْءٌ : *Syai'un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ

Dīnullāh

بِاَ لَهِ

Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اَللّٰهُ رَحْمَةً فِيْ هُمْ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū alWalid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
r.a	=	<i>radiallahu ‘anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w.	=	Wafat tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بـ دون
لعمص	=	وسلم عليه الله صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بـ دون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, yang seringkali dijuluki sebagai negara maritim, terkenal karena memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar daripada luas wilayah daratannya. memiliki total luas wilayah sekitar 7,81 juta km² dan diisi dengan sejumlah pulau-pulau yakni terdapat kurang lebih 17.499 pulau. Dari total wilayah tersebut apabila dirincikan maka terdapat 3,25 juta km² wilayah laut dan 2,55 juta km² yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif. Sekitar 2,01 juta km² dari luas wilayah Indonesia adalah wilayah daratan.¹

Meskipun Indonesia telah dianugrahi sumber daya laut yang begitu luas. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebagian besar nelayan Indonesia masih berada dalam jeratan kemiskinan. Dibandingkan dengan sektor pertanian, dalam suatu penelitian nelayan tergolong dalam kelompok lapisan sosial yang paling miskin.² Ini disebabkan oleh seringnya masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari komunitas pesisir diabaikan dalam upaya pembangunan. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan perhatiannya pada sektor daratan. Akibat minimnya dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain. berbagai masalah kompleks muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Berdasarkan data dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada 2019, terdapat 14,58 juta jiwa nelayan miskin dimana angka tersebut menyumbang 25% kemiskinan nasional. Keterbatasan ekonomi ini merupakan persoalan yang kompleks karena akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Ketika menghadapi keterbatasan

¹ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan Dan Perikanan Indonesia," (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut, 2020)

² Debora Laksmi Indraswari, "Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir Yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan," in *Kompas.Id* (Kompas.id, 2023).

ekonomi, ditambah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, nelayan cenderung melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut yang tersedia, yang pada akhirnya akan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup generasi selanjutnya.

Desa Kupa terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Secara geografis wilayah Desa Kupa merupakan wilayah pesisir. mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan utama di sektor perikanan atau bekerja sebagai nelayan. Terdapat sejumlah 448 jiwa nelayan, mayoritas masih dalam kategori nelayan kecil.³ Meskipun desa Kupa memiliki banyak potensi sumber daya perikanan, para nelayan di sana menghadapi masalah ekonomi yang serius. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kupa, desa ini termasuk dalam kategori desa dengan tingkat kesejahteraan rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan di masyarakat, yang menyebabkan mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dari data yang disajikan dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Nampak bahwa salah satu sektor yang menjadi penyumbang kemiskinan adalah di sektor maritim, yakni yang bekerja sebagai nelayan.⁴ Indikasi kemiskinan tersebut dilihat dari rendahnya pendapatan yang diterima oleh para nelayan mengakibatkan nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya terhadap sandang, pangan, perumahan serta tingkat pendidikan yang layak. Masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat nelayan di Desa Kupa adalah ketidakmampuan untuk melakukan penangkapan ikan sepanjang tahun karena kondisi alam yang tidak mendukung. Terdapat periode-periode nelayan tidak dapat melaut karena adanya angin kencang, gelombang besar, dan arus laut yang kuat. Situasi seperti ini sering disebut sebagai musim paceklik di mana nelayan tidak dapat aktif bekerja. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka terpaksa harus meminjam ke pedagang setelah cuaca membaik dan nelayan menghasilkan tangkapan yang melimpah maka

³ Tim Penyusun, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kupa*, 2017.

⁴ Tim Penyusun, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kupa*, 2017.

barulah nelayan membayar pinjamannya. Selain karena faktor cuaca, ada permasalahan lain yang juga mempengaruhi minimnya pendapatan nelayan desa Kupa, yakni tingkat pendidikan masyarakat rata-rata hanya mampu lulus di tingkat SD maupun SMP, sehingga keterampilan mereka hanya terbatas pada penangkapan ikan menggunakan alat tradisional.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat nelayan sangat mendesak untuk dilakukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok melalui pelatihan, akses terhadap teknologi, serta peningkatan keterampilan yang relevan dengan industri perikanan. Dengan pemberdayaan yang tepat, diharapkan masyarakat nelayan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya laut yang ada, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemah: *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*⁵ Ayat ini mengingatkan manusia untuk memanfaatkan potensi alam yang telah Allah Swt sediakan secara bijak sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya memakmurkan kehidupan.

Peningkatan ekonomi keluarga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah desa Kupa telah berupaya menerapkan program pemberdayaan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, program tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberian bantuan alat tangkap seperti mesin motor, jaring, dan mengadakan pelatihan untuk menunjang keterampilan nelayan. Namun, Observasi awal yang peneliti lakukan menunjukkan

⁵ Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qarim, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," JAKARTA: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2022.

bahwa sejumlah program pemberdayaan yang telah diimplementasikan, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan seperti bantuan yang diberikan tidak merata, bantuan yang diterima tidak cukup untuk mengubah kondisi ekonomi secara signifikan, dan program pelatihan belum dilakukan secara rutin.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat dimampukan agar dapat berinisiatif sendiri untuk memulai kegiatan sosial untuk meningkatkan pendapatan mata pencaharian, dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat secara keseluruhan.⁶ Dari definisi tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan langkah dimana individu atau kelompok masyarakat diberdayakan dengan kekuatan dan keterampilan guna menghadapi permasalahan, mengoptimalkan potensi, serta meningkatkan kualitas hidup secara independen.

Proses pemberdayaan seharusnya menitik beratkan pada memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup kepada individu agar mereka mampu mempengaruhi kehidupan pribadi serta kehidupan orang lain yang menjadi perhatian mereka.⁷ Namun sayangnya, pemberdayaan saat ini sering kali diarahkan sebagai upaya politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, padahal seharusnya mencakup partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kapasitas individu, dan pengembangan potensi sosial-budaya guna mencapai kemandirian.

Sehingga memberdayakan masyarakat melalui bantuan, baik secara individu maupun melalui kelompok, pada dasarnya hanya akan memenuhi kebutuhan praktis sesaat. Lebih dari itu, pendekatan semacam ini tidak mendorong mandiri dalam kehidupan masyarakat, malah cenderung menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu, meskipun pemerintah memberikan bantuan sebanyak apa pun, tanpa diintegrasikan dengan strategi yang tepat, bantuan tersebut tidak akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Ahmad Suhaimi, *Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama), 2016), h.33

⁷ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2019), h.88

Terkait dengan permasalahan tersebut sangat penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan yang diimplementasikan di Desa Kupa dengan menitik beratkan pada proses pemberdayaan dan kendala atau hambatan yang dihadapi. Diharapkan hasil analisis dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang berguna bagi pemerintah desa Kupa, terutama terkait dengan masyarakat nelayan di desa Kupa.

B. Rumusan Masalah

Fungsi utama dari rumusan masalah adalah sebagai panduan untuk menjaga agar penelitian tetap fokus dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁸ Dengan rumusan masalah, peneliti dapat menentukan arah penelitian secara lebih terstruktur dan terfokus pada isu-isu yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru?
2. Apa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat nelayan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap ekonomi keluarga nelayan di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana program-program pemberdayaan telah diterapkan di Desa Kupa dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Fokus utama penelitian adalah

⁸ Dkk Muhammad Kamal Zubair, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). hal. 44

mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan, termasuk mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta dampak nyata pada kehidupan ekonomi nelayan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan atau kekurangan program-program tersebut, yang pada gilirannya akan membantu menyusun kebijakan atau tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga nelayan di masa depan. Berikut diuraikan secara jelas tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru.
2. Untuk mengidentifikasi faktor Penghambat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga di Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru.
3. Untuk mengidentifikasi dampak pemberdayaan masyarakat terhadap ekonomi keluarga nelayan di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat nelayan. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya pemberdayaan dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga nelayan. Hasil dan temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman akademis dan memperdalam kajian mengenai strategi pemberdayaan yang efektif untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menambah literatur ilmiah, tetapi juga memberikan wawasan baru yang relevan bagi studi-studi di masa mendatang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau landasan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan kajian tentang pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan informasi, data, serta konsep yang relevan, yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk memperluas atau menggali lebih dalam berbagai aspek pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam konteks ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan temuan-temuan praktis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang lebih luas dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, yang bermanfaat bagi studi-studi akademis di masa depan.
- c. Secara akademis, penelitian ini dapat mengisi gap atau kekosongan literatur yang mungkin belum banyak dibahas, terutama dalam konteks pemberdayaan nelayan di wilayah Desa Kupa.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau instansi terkait untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan membantu pemerintah desa atau lembaga pemberdayaan dalam mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat memperbaiki program pemberdayaan ke depannya.
- c. Bagi masyarakat nelayan di Desa Kupa, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan solusi praktis terkait bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah proses di mana peneliti menelaah dan mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik atau objek yang sedang dikaji. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perkembangan penelitian yang telah dilakukan, menemukan celah atau kekosongan dalam literatur, serta mengidentifikasi kontribusi penelitian sebelumnya. Dengan melakukan tinjauan ini, peneliti dapat menjadikannya sebagai acuan dan pijakan dalam merumuskan pertanyaan penelitian, metode, serta menyusun argumen yang lebih solid, sehingga dapat memperluas wawasan dan memberikan sumbangan baru dalam bidang kajian tersebut.

Dalam Jurnal penelitian pada tahun 2020 yang ditulis oleh Plangiten dkk, dengan judul “Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan di Kelurahan Karekon Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan nelayan. Penelitian tersebut dikaji dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada 65 komunitas nelayan yang telah ditentukan, kemudian data tersebut diolah menggunakan metode statistik dengan menggunakan SPSS versi 20. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan, hasil analisis regresi sederhana diketahui nilai konstanta (a) sebesar 15,734 sedangkan nilai (b atau koefisien Regresi) diperoleh nilai positif sebesar 0,369 sehingga persamaan regresi dapat ditulis $\hat{Y} = 15,734 + 0,369X$. Dimana setiap peningkatan nilai Pemberdayaan Masyarakat sebesar 1% maka nilai pendapatan meningkat sebesar 0,369 atau 36,9% sehingga dapat

disimpulkan bahwa arah variabel pemberdayaan masyarakat (X) terhadap variabel pendapatan (Y) adalah positif.⁹

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan antara penelitian penulis dengan penelitian Planginten dkk. Kedua penelitian sama-sama berfokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan, dengan tujuan untuk memahami dampaknya terhadap kondisi ekonomi mereka. Penelitian sebelumnya meneliti hubungan antara pemberdayaan dan pendapatan nelayan menggunakan metode kuantitatif, sementara penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Ini berarti bahwa meskipun fokus penelitian kami mirip, pendekatan yang saya gunakan berbeda secara metodologis.

Dalam jurnal penelitian dengan judul “Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra di Jepara,” yang disusun oleh Maygsi Aldian Suwandi dan Silverius Djuni Prihatin pada tahun 2020. Masalah penelitian pada penelitian tersebut yaitu bagaimana upaya pemberdayaan melalui KUB dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan di Jepara. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pemberdayaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat nelayan Jepara melalui KUB Berkah Samudra melaksanakan tiga tahapan pemberdayaan: menyadarkan anggota tentang potensi mereka dan pentingnya berkelompok; meningkatkan kapasitas dengan menyediakan pelatihan yang mendukung kegiatan nelayan dan keluarganya baik secara individu maupun sebagai kelompok; serta memberdayakan anggota dengan meningkatkan kesejahteraan mereka dari segi ekonomi dan sosial.¹⁰

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. keduanya sama-sama berfokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan

⁹ Raldy, Cheiven, A, Dareno, Florance, D, J Lengkong, and Novva, N Panginten, “Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan di Kelurahan Karekon Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung.” *Jurnal Administrasi Publik* 5(75) (2019) .

¹⁰ Maygsi Aldian Suwandi and Silverius Djuni Prihatin, “Membangun Keberdayaan Nelayan : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui ‘ Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra ’ Di Jepara , Indonesia,” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol.10, No (2020).

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta teori pemberdayaan sebagai landasan analisis. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting. Penelitian ini berlokasi di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sementara penelitian sebelumnya berlokasi di Jepara. Perbedaan lokasi ini membawa variasi konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi dinamika pemberdayaan. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih mengarah pada deskripsi tiga tahapan pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), yaitu menyadarkan anggota tentang potensi mereka, meningkatkan kapasitas dengan pelatihan, dan memberdayakan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sementara itu, pada penelitian ini peneliti mengkaji aspek pemberdayaan yang lebih komprehensif, termasuk analisis dampak terhadap ekonomi keluarga serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Perbedaan ini membuat kedua penelitian saling melengkapi dalam pemahaman pemberdayaan nelayan.

Dalam skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”, disusun oleh Irfan Makhopa pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan terhadap masyarakat nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian lapangan) yang digunakan untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan laut dengan melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penggunaan teknologi *Global Positioning System (GPS)*. Teknologi GPS membantu nelayan tidak tersesat, mempermudah mereka dalam menentukan rute

perjalanan, dan memungkinkan mereka mengetahui lokasi yang kaya akan ikan, sehingga hasil tangkapan laut dapat ditingkatkan.¹¹

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji proses pemberdayaan dan di dasarkan pada teori pemberdayaan. Namun, terdapat beberapa perbedaan yakni penelitian ini berfokus pada program pemberdayaan berupa pemberian alat tangkap dan pelatihan serta mengkaji hambatan dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga nelayan di Desa Kupa. Sementara itu, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pemberdayaan nelayan melalui penggunaan teknologi GPS yang diterapkan oleh kelompok nelayan di Desa Lontar untuk meningkatkan hasil tangkapan laut.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori menyajikan pandangan terhadap suatu fenomena yang tersusun secara sistematis. Dalam melakukan penelitian, teori berfungsi memberikan penjelasan tentang gejala dan indikasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Landasan teori adalah dasar pemikiran yang mendasari penelitian ini untuk memahami fenomena pemberdayaan masyarakat nelayan dan kaitannya dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga. Pada penelitian ini, teori pemberdayaan menurut Mardikanto dan teori partisipasi dipilih sebagai kerangka analisis karena keduanya relevan dalam menilai interaksi antara masyarakat nelayan dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kupa.

Pemberdayaan nelayan di Desa Kupa melibatkan intervensi berupa pemberian bantuan alat tangkap, pelatihan, dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori pemberdayaan sangat penting karena teori ini tidak hanya melihat pada aspek pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Sementara itu, teori partisipasi memberi

¹¹ Irfan Makhopa, "Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang" (2020), h.2

pemahaman tentang bagaimana peran aktif nelayan dalam setiap tahap program pemberdayaan, dari perencanaan hingga evaluasi, dapat mempengaruhi keberhasilan program.

1. Teori Pemberdayaan

Prof. Totok Mardikanto, seorang akademisi di bidang pemberdayaan masyarakat, menyusun teori pemberdayaan yang banyak digunakan dalam konteks pengembangan masyarakat di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat*, Mardikanto mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses sekaligus tujuan yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat mencapai kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembangkan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki.¹² Sebagai proses, pemberdayaan mencakup rangkaian aktivitas untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang kurang beruntung, terutama yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada hasil yang ditandai dengan perubahan sosial di mana masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki otonomi, serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan kelompok rentan agar mereka bisa menyuarakan pendapat, memenuhi kebutuhan, serta terlibat dalam pembangunan dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan mereka. Definisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesejahteraan sosial, kebebasan dari penindasan, keamanan, dan hak asasi.¹³

¹² Mardikanto T and Poerwoko S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.63

¹³ Mardikanto T and Poerwoko S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.69

Teori pemberdayaan dari Mardikanto menekankan beberapa prinsip utama:¹⁴

Peningkatan Kapasitas Individu dan Kelembagaan: Mardikanto menyatakan bahwa pemberdayaan harus meningkatkan kapasitas atau keterampilan individu dan juga kapasitas kelembagaan dalam masyarakat. Artinya, nelayan tidak hanya menerima bantuan tetapi juga diberikan pelatihan dan keterampilan yang membuat mereka mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya: Mardikanto berpendapat bahwa pemberdayaan harus membuka akses masyarakat terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dalam konteks penelitian Anda, ini bisa berarti menyediakan alat tangkap, perahu, atau akses finansial yang mendukung kegiatan ekonomi nelayan. Akses ini tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga termasuk akses informasi, teknologi, dan peluang pasar yang relevan.

Peningkatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Salah satu ciri penting pemberdayaan menurut Mardikanto adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan hidup mereka. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya sekadar pelibatan, tetapi memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar didengarkan dan dipertimbangkan dalam program-program yang dibuat untuk mereka.

¹⁴ Mardikanto T and Poerwoko S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.70

Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan: Mardikanto menekankan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan adalah kemandirian, yaitu kondisi di mana masyarakat mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai kesejahteraan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal. Kemandirian ini mencakup kemampuan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam penelitian Anda, kemandirian ekonomi nelayan adalah salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan bahasa Inggris dari kata “*empowerment*” dengan kata dasar “*power*” yang artinya kekuatan. Apabila diuraikan secara rinci pemberdayaan merupakan pemberian kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makanan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan dan kesehatan.¹⁵

Mardikanto dan Soebianto dalam Hamid, mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses yang berfokus pada upaya penguatan dan pengoptimalan potensi komunitas yang dianggap kurang berdaya dalam masyarakat, terutama mereka yang menghadapi tantangan kemiskinan.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan bantuan sementara, tetapi lebih kepada rangkaian tindakan yang berkesinambungan untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi mereka. Pandangan ini juga menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi, tetapi melibatkan partisipasi aktif

¹⁵ Suaib, *Relasi Antar Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023).

¹⁶ Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), h. 9

komunitas dalam mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan mereka sendiri. Proses ini mencakup tindakan-tindakan yang sistematis dan terencana, bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekadar memberikan solusi instan atau jangka pendek.

Merujuk definisi sebelumnya, pemberdayaan adalah usaha memberi pertolongan kepada orang-orang sehingga bisa membantu diri mereka sendiri. Sedangkan Naryan mengartikan pemberdayaan yang menunjuk pada pilihan untuk mengembangkan kebebasan seluas-luasnya dan tindakan dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya dikemukakan bahwa pemberdayaan adalah pengembangan aset-aset dan kapasitas penduduk miskin tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mempertahankan tanggung jawab institusi terhadap efek kehidupan mereka.¹⁷ Jadi, pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan sebagai upaya sosial dimana anggota suatu komunitas bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan bersama guna mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan social, sejalan dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

Menurut Robert Chambers, seorang ahli yang sangat berdedikasi pada pemberdayaan masyarakat, ia berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu gagasan dalam pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial yang penting. Gagasan ini mencerminkan pendekatan baru terhadap pembangunan yang menitikberatkan pada manusia (*people centered*), melibatkan partisipasi aktif (*participatory*), memberdayakan individu (*empowering*), dan berusaha untuk berkelanjutan (*sustainable*). Konsep ini jauh lebih komprehensif daripada sekadar memenuhi kebutuhan dasar atau

¹⁷ Mohammad Ikbal Bahua, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h.85

menyediakan jaring pengaman untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut, yang sebelumnya menjadi fokus utama dalam pembangunan.¹⁸

Dalam definisi tersebut Chambers menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, konsep “*people centered*” menunjukkan bahwa pembangunan harus memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai individu, bukan hanya sebagai statistik atau unit ekonomi. Dengan demikian, masyarakat diakui sebagai agen aktif dalam proses pembangunan, yang memiliki hak dan kemampuan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan mereka.

Selanjutnya, “*Participatory*” adalah elemen kunci dalam pendekatan ini, di mana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan, sehingga hasilnya lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

“*empowering*” mengacu pada upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

“*sustainable*” menunjukkan bahwa pembangunan harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial. Ini berarti bahwa upaya pemberdayaan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan kesinambungan sosial, memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat yang sama.

¹⁸ Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), h.10

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

b. Tujuan Pemberdayaan

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penciptaan masyarakat yang mandiri. Tentu saja, independensi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, budaya, hak untuk bersuara atau berpendapat, bahkan mencapai tingkat di mana masyarakat memiliki kemandirian untuk menentukan hak-hak politiknya.

Maksud utama dari upaya pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan tidak memiliki daya tahan, baik karena faktor internal seperti persepsi mereka sendiri, maupun karena faktor eksternal seperti penindasan oleh struktur sosial yang tidak adil. Menurut pandangan Mardikanto dan Poerwoko, pemberdayaan bertujuan untuk melibatkan berbagai usaha perbaikan, yang meliputi sebagai berikut:¹⁹

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) berarti bahwa pemberdayaan harus dikonsepsikan sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas

¹⁹ Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), h.11-13

pada peningkatan materi, metode, penyesuaian waktu dan tempat, serta hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat. Selain itu, hal yang sama pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non-formal dalam konteks pemberdayaan dapat merangsang semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batasan waktu dan usia.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), mengindikasikan bahwa dengan semakin berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan, terutama aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan, dan lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*) berarti bahwa melalui perbaikan pendidikan dan keterjangkauan dengan berbagai sumber daya (SDM, SDA dan Sumber daya buatan lainnya) yang lebih baik, diharapkan akan menghasilkan tindakan yang semakin membaik.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) berarti melalui peningkatan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki struktur kelembagaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan jejaring kemitraan-usaha, dengan tujuan menciptakan posisi tawar yang kuat di dalam masyarakat.
5. Perbaikan usaha (*better business*) merujuk pada perbaikan pendidikan (semangat belajar), keterjangkauan, kegiatan, dan kelembagaan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas usaha atau bisnis yang sedang dijalankan.
6. Perbaikan pendapatan (*better income*) merujuk pada peningkatan bisnis yang sedang dijalankan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan bagi keluarga dan masyarakat terkait.
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) berarti bahwa dengan meningkatnya pendapatan, dapat terjadi perbaikan pada kondisi lingkungan (baik fisik maupun sosial), karena kerusakan lingkungan

seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan atau keterbatasan pendapatan.

8. Perbaikan kehidupan (*better living*) berarti bahwa dengan tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat meningkatkan kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat (*better community*) merujuk pada kondisi kehidupan yang lebih baik, didukung oleh perbaikan lingkungan (baik fisik maupun sosial), dengan harapan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Upaya pemberdayaan yang dijelaskan oleh Mardikanto dan Poerwoko menyoroti pentingnya melibatkan berbagai aspek pembangunan untuk mencapai transformasi menyeluruh dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan akses atau keterampilan, tetapi juga tentang mengubah persepsi, memperkuat lembaga, dan mempromosikan tindakan yang membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua.

c. Prinsip Pemberdayaan

Aswas mengemukakan bahwa dalam upaya pemberdayaan, terutama yang diarahkan kepada masyarakat, aparat atau agen pemberdayaan perlu mengikuti beberapa prinsip yang menjadi pedoman. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan, memastikan agar proses berjalan sesuai dengan esensi dan konsep pemberdayaan. Berikut prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Aswas:²⁰

1. Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara demokratis dan penuh kesungguhan, tanpa adanya unsur pemaksaan. Hal ini dikarenakan setiap

²⁰ Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), h.17-19

komunitas memiliki permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang beragam, sehingga semua mendapatkan hak yang setara untuk diberdayakan.

2. Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang ada dalam kelompok sasaran. Untuk itu pada tahap awal pemberdayaan sangatlah penting melakukan proses identifikasi dan sosialisasi dengan melibatkan kelompok sasaran.
3. Masyarakat sebagai sasaran utama dalam pemberdayaan ditempatkan sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan pemberdayaan. Masyarakat harus menjadi dasar utama dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan jenis kegiatan pemberdayaan.
4. Mendorong regenerasi nilai-nilai budaya dan kebijaksanaan lokal, seperti semangat gotong royong, penghargaan generasi muda terhadap yang lebih tua, dan kasih sayang yang diberikan oleh generasi tua kepada yang lebih muda, karena hal ini menjadi sumber daya sosial yang penting dalam proses pembangunan.
5. Pengimplementasian dilakukan secara berangsur-angsur dan terus-menerus, karena merupakan suatu proses yang memerlukan waktu, diarahkan secara logis dan sederhana menuju aspek yang lebih kompleks.
6. Menghargai beragam karakter, budaya, dan tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun.
7. Menyelidiki seluruh dimensi kehidupan masyarakat, khususnya dalam ranah sosial dan ekonomi.
8. Tidak ada tanda-tanda diskriminasi, terutama terhadap kaum perempuan.
9. Selalu mengimplementasikan pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi, seperti menetapkan waktu, materi, metode kegiatan, dan elemen-elemen lainnya.
10. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang melibatkan unsur fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non-fisik (pendapat, waktu, dukungan).

11. Aparat atau agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator yang dilengkapi dengan kemampuan dan kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka bersedia bekerja sama dengan semua pihak, institusi, serta lembaga masyarakat atau LSM yang terkait.

Penjelasan prinsip tersebut menggaris bawahi komitmen untuk melibatkan masyarakat secara luas dan berkelanjutan dalam proses pemberdayaan, serta pentingnya memperkuat kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan ini secara konsisten, diharapkan dapat terwujud transformasi menyeluruh dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selain daripada prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 prinsip pemberdayaan yang sering dijadikan acuan atau pedoman dalam pemberdayaan, yakni ²¹

- 1) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan, serta antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi posisi antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang terbentuk melibatkan hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme bagi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian, di mana masing-masing pihak saling mengenali kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Proses ini menciptakan kondisi saling belajar yang positif.

²¹ Dedeh Maryani and Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama), 2019). h. 11-12

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang efektif dalam merangsang kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tingkat tersebut, diperlukan waktu dan pendampingan yang melibatkan pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan menerima panduan yang jelas dari pendamping, memotivasi diri mereka sendiri untuk mengembangkan potensi individu masing-masing. Pada akhirnya, setiap individu di dalam masyarakat tersebut dapat mencapai tingkat kemandirian, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara layak.

3) Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan mengacu pada menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bergantung pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak melihat individu yang kurang mampu sebagai objek tanpa kemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi terbatas. Mereka memiliki kapasitas untuk mengumpulkan pengetahuan mendalam tentang hambatan-hambatan dalam usaha mereka, memahami kondisi lingkungan mereka, memiliki sumber daya tenaga kerja dan tekad, serta mematuhi norma-norma masyarakat yang telah lama diterapkan. Semua ini perlu diidentifikasi dan dijadikan dasar modal untuk memulai proses pemberdayaan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya serta mampu mengatasi persoalannya.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu direncanakan agar dapat berkelanjutan, meskipun awalnya peran pendamping lebih dominan daripada peran masyarakat itu sendiri. Secara perlahan namun pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihilangkan, karena

masyarakat telah mampu mandiri dalam mengelola kegiatan mereka sendiri. Ini berarti bahwa desain program pemberdayaan harus progresif, memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat, terlihat melalui partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Seiring waktu, setiap individu dapat mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup mereka dengan layak.

d. Strategi Pemberdayaan

Stoner dan Wanber mengungkapkan bahwa strategi dapat diinterpretasikan dari setidaknya dua perspektif yang berbeda. Dalam perspektif pertama, strategi diartikan sebagai rencana umum untuk merumuskan dan mencapai tujuan serta menjalankan misi organisasi. Sementara dalam perspektif kedua, strategi dianggap sebagai pola respons organisasi terhadap perubahan lingkungannya sepanjang waktu. Selanjutnya Ermaya, menyatakan bahwa strategi merujuk pada suatu usaha yang dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran.²² Berdasarkan definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah tata cara bertindak yang telah disusun secara seksama untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Proses strategi mencakup pemilihan langkah-langkah yang sesuai dan optimal pemanfaatan sumber daya, sambil mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Parson menjelaskan bahwa umumnya, proses pemberdayaan dilaksanakan secara bersama-sama. Meskipun demikian, dalam beberapa situasi tertentu, strategi pemberdayaan juga dapat diimplementasikan secara

²² Bahua, Mohammad Iqbal, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), h.92

individual. Penting untuk dicatat bahwa walaupun demikian, strategi ini tetap terkait dengan konsep kolektivitas, dimana keterlibatan klien atau masyarakat sasaran terhubung dengan sumber daya atau sistem lain di luar dirinya sendiri. Dalam kerangka pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dijalankan melalui tiga tingkat atau dimensi pemberdayaan yaitu:

1. **Aras Mikro** melibatkan pemberdayaan yang diarahkan kepada individu klien melalui kegiatan seperti bimbingan, konseling, manajemen stres, dan intervensi krisis. Tujuannya utamanya adalah memberikan panduan atau pelatihan kepada klien agar dapat mengatasi tugas-tugas hidup mereka. Pendekatan ini sering diidentifikasi sebagai model yang fokus pada tugas (task-centered approach).
2. **Aras Mezzo** melibatkan pemberdayaan yang ditujukan kepada sekelompok klien, dengan menggunakan kelompok sebagai sarana intervensi. Pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok sering diimplementasikan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap klien. Tujuannya adalah agar kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
3. **Aras Makro**, juga dikenal sebagai strategi sistem besar (large-system strategy), berfokus pada perubahan sistem lingkungan yang berskala luas. Pendekatan ini melibatkan formulasi kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik sebagai beberapa strategi yang digunakan. Dalam perspektif strategi sistem besar, klien dianggap memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan memiliki kemampuan untuk memilih serta menentukan strategi yang sesuai untuk mengambil tindakan.

e. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan bukanlah suatu kegiatan yang instan. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto pemberdayaan adalah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yang terdiri atas: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.²³

Tahap awal yakni penyadaran, di mana subjek akan diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Sebagai contoh, jika targetnya adalah kelompok miskin, mereka diberi pencerahan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program pada tahap ini mencakup pemberian pengetahuan kognitif, keyakinan (belief), dan penyembuhan (healing). Prinsip utamanya adalah membuat subjek menyadari kebutuhan mereka untuk diberdayakan, dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari faktor eksternal.

Tahap berikutnya adalah membangun kapasitas, atau secara lebih sederhana disebut memampukan atau memberdayakan. Untuk memberikan kekuasaan atau daya, individu terkait harus memiliki kemampuan terlebih dahulu. Pada tahap ini masyarakat mendapatkan program untuk mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka mengelola manajemen diri dan sumber daya yang mereka miliki. Proses pembangunan kapasitas terdiri dari tiga jenis, yakni kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Tahap ketiga melibatkan pemberian daya atau "*empowerment*" dalam arti yang lebih khusus. Pada tahap ini, target menerima daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang yang sejalan dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip

²³ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi* (Jawa Timur: FAM Publishing, 2013), h.31

utamanya adalah bahwa pemberian daya atau kekuasaan disesuaikan dengan kualitas kecakapan penerima.

Pelaksanaan proses pemberdayaan harus mengacu pada prinsip pemberdayaan. Bahwa pencapaian tujuan pemberdayaan terutama tergantung pada pelaksanaan proses suatu program. Hal yang paling krusial adalah keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman paling mendalam terkait dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan utama, dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pendekatan yang sebaiknya diambil oleh fasilitator adalah dari bawah ke atas (aspirasi masyarakat).

Harry menjelaskan bahwa proses pemberdayaan memiliki kecenderungan. Yakni kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primer, yaitu proses pemberdayaan yang berfokus pada pemberian sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemandirian individu. Proses ini dapat melibatkan pembangunan aset material untuk mendukung kemajuan mereka melalui organisasi. Sementara Kecenderungan sekunder, yaitu Proses pemberdayaan yang berfokus pada rangsangan, dorongan, atau motivasi untuk memastikan bahwa individu memiliki kemampuan atau kekuatan dalam mengambil keputusan tentang arah hidupnya melalui dialog.²⁴ Dalam proses pemberdayaan, masyarakat dapat menerima kekuatan dengan memberikan dukungan berupa pembangunan aset dan dapat pula menerima kekuatan melalui pemberian motivasi agar masyarakat mampu memutuskan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan arah hidupnya.

²⁴ Hamid, Hendrawati, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makassar: De La Macca, 2018), h.110-111

3. Teori Partisipasi

Dalam bukunya, Mikkelsen mengungkapkan ada dua makna partisipasi masyarakat yang saling melengkapi, yaitu: (1) partisipasi transformasional yaitu terjadi ketika partisipasi itu dipandang sebagai tujuan dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi; dan (2) partisipasi instrumental yaitu terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu.²⁵ Partisipasi dalam konteks ini adalah sebuah proses aktif dimana individu atau kelompok secara sukarela mengambil inisiatif untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau keputusan. Ini melibatkan penggunaan kebebasan mereka untuk bertindak dan berkontribusi secara langsung.

Selain itu, Keit Davis dan Jhon W. Nestrom dalam Hendrawati Hamid, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, serta berbagi tanggungjawab atas pencapaian tersebut.²⁶ Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi bukan sekedar keterlibatan. Fisik dalam suatu kelompok, akan tetapi juga berkontribusi secara aktif dan merasa bertanggungjawab terhadap hasil yang ingin dicapai bersama. Selain itu, konsep partisipasi yang diungkapkan Davis dan Newstrom menekankan pada pentingnya tanggungjawab bersama. Ini berarti keberhasilan kelompok tidak hanya menjadi tugas pemimpin atau beberapa individu saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua anggota yang terlibat. Dengan demikian, partisipasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja kelompok secara keseluruhan karena setiap orang merasa terlibat dan bertanggung jawab atas proses dan hasil yang dicapai. Berikut adalah beberapa poin penting dari definisi ini:

²⁵ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan Panduan Bagi Praktisi Lapangan Diterjemahkan Matheos Nalle* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 1999). h.40

²⁶ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), h.148

1. **Keterlibatan mental dan emosional**, unsur ini menekankan bahwa partisipasi tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik atau kontribusi praktis, tetapi terutama dari keterlibatan mental dan emosional yang mencerminkan faktor psikologis. Hal ini berarti seseorang yang berpartisipasi akan terlibat secara emosional dan memiliki komitmen terhadap tugas atau tujuan yang ingin dicapai. Ini menandakan bahwa aspek psikologis, seperti perasaan memiliki, tanggung jawab, kepedulian terhadap hasil, lebih penting daripada sekedar keterlibatan fisik.
2. **Dorongan internal untuk berkontribusi**, Partisipasi juga melibatkan adanya motivasi dari dalam diri individu untuk memberikan kontribusi, baik itu berupa ide, tenaga, dana, maupun waktu. Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya penerapan perintah atau gagasan dari pemimpin atau manajer, tetapi merupakan proses interaksi sosial dua arah, di mana setiap orang dapat memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih kolaboratif dan dinamis, melibatkan pertukaran ide dan sumber daya antarindividu dalam kelompok.
3. **Kesediaan untuk Bertanggung Jawab**: Individu yang berpartisipasi siap untuk bertanggung jawab atas hasil aktivitas kelompok. Ini menunjukkan rasa kepemilikan terhadap proses dan hasil, serta komitmen untuk memastikan keberhasilan kelompok secara keseluruhan.

Mardikanto dan Soebiato mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Pengertian tersebut menekankan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar keterlibatan pasif,

melainkan adanya niat dan tindakan aktif dari individu untuk berkontribusi dalam kegiatan dengan harapan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi diri mereka. Dengan kata lain, partisipasi dilihat sebagai proses timbal balik di mana individu berkontribusi dan pada saat yang sama memperoleh sesuatu sebagai imbalannya.

Partisipasi dianggap sebagai elemen yang sangat penting karena masyarakat adalah pihak yang akan melanjutkan dan menjalankan program tersebut.²⁷ Ketika masyarakat terlibat, mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat, sehingga keterlibatan mereka tidak hanya pada tahap implementasi, tetapi juga pada tahap analisis dan perencanaan. Ini memungkinkan keterampilan dan pengetahuan berpindah kepada masyarakat, memberdayakan mereka untuk menjadi lebih mandiri.

Penting juga untuk dipahami bahwa partisipasi tidak hanya dilihat dari aspek fisik, seperti bekerja bakti atau mengikuti kegiatan penyuluhan. Masyarakat yang memberikan inisiatif, saran, atau ide-ide juga sudah dianggap berpartisipasi. Oleh karena itu, partisipasi lebih luas dan dalam daripada sekadar keterlibatan fisik, melainkan mencakup kontribusi pemikiran dan ide yang juga berharga.

Selanjutnya Cohen dan Uphoff juga menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu :²⁸

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making); Ini mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program atau proyek

²⁷ Hamid. h.149

²⁸ Claudia Indriani, Sulaiman Asang, and Amril Hans, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 1, no. 1 (2021): 57–67, <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.18597>. h58-59

pembangunan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan terlibat dalam rapat-rapat dan diskusi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan saran, sehingga proses perencanaan menjadi lebih inklusif dan demokratis.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation); masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan program atau proyek yang telah direncanakan. Keterlibatan ini dapat berupa kontribusi langsung, baik melalui tenaga kerja, sumber daya, maupun dukungan lainnya. Partisipasi dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits); Bentuk partisipasi ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengalami manfaat dari proyek yang dilaksanakan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menerima manfaat secara pasif, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan manfaat tersebut. Keterlibatan dalam proses distribusi manfaat membantu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasakan dampak positif dari program yang ada, dan ini dapat memperkuat keadilan sosial dalam pembangunan.
4. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation); partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memberikan umpan balik terhadap keberhasilan dan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat mengenai apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Partisipasi dalam evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk

menilai keberhasilan proyek, tetapi juga sebagai mekanisme untuk perbaikan berkelanjutan dalam program-program pembangunan ke depan.

Keempat bentuk partisipasi ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan. Partisipasi tidak hanya meningkatkan keberhasilan proyek, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan. Dengan demikian, setiap bentuk partisipasi tersebut berkontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program, sehingga pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Teori untuk menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein dalam Suryono sebagai *leader of participation* (tangga partisipasi). Teori ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:²⁹

Tabel 2.1 Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat

Tangga	Bentuk Partisipasi	Kategori
VIII	Pengawasan/kendali Masyarakat	Tingkatan partisipasi Sebagai kekuatan masyarakat (<i>degree of citizen power</i>)
VII	Pendelegasian kekuasaan dan kewenangan	
VI	Kemitraan/kesetaraan	
V	Perdamaian/Kompromi	Tingkatan partisipasi yang Bersifat semu (<i>Tokenisme</i>)
IV	Berkonsultasi	
III	Memberi informasi	
II	Therapy (diagnosis untuk pengobatan dan penyembuhan)	Tingkatan bukan partisipasi
I	Memanipulasi (Rekayasa)	

²⁹ Mochamad Chazieul Ulum and Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Malang: UB Press, 2020). h.13-14

Sumber: Arnstein dalam Muhammad dan Niken (2020)

Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimiliki masyarakat untuk memengaruhi perubahan. Partisipasi ini dibagi menjadi tiga tingkatan utama, yang kemudian dirinci lebih lanjut menjadi delapan jenjang atau anak tangga partisipasi. Setiap jenjang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang berbeda, mulai dari partisipasi yang tidak nyata hingga kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan. Pada tingkat terendah, dikenal sebagai nonpartisipasi, masyarakat sebenarnya tidak dilibatkan secara bermakna, dan partisipasi tersebut hanya menjadi formalitas yang menciptakan kesan palsu keterlibatan. Hal ini disebut sebagai distorsi partisipasi karena masyarakat tidak benar-benar memiliki pengaruh dalam proses kebijakan.³⁰

Teori ini memiliki delapan model anak tangga partisipasi masyarakat dengan bentuk pengawasan masyarakat, pendelegasian kekuasaan dan wewenang, kemitraan/kesetaraan, perdamaian/ kompromi, konsultasi, pemberian informasi, *therapy* (diagnosis untuk penyembuhan), dengan melibatkan tiga kategori yang berbeda dalam anak tangga tersebut, antara lain kategori level partisipasi sebagai kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*), level partisipasi yang bersifat semu atau *pseudo* (tokenisme), dan yang terakhir level bukan partisipasi.

Derajat pertama atau derajat terendah adalah distorsi partisipasi, dengan tujuan sebenarnya bukan untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan penguasa untuk mendidik dan menyamankan partisipasi. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan adanya partisipasi

³⁰ Mochamad Chazieul Ulum and Niken Lastiti Veri Anggaini, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Malang: UB Press, 2020). h. 15

(*tokenism*). Keterlibatan masyarakat lebih tinggi pada derajat ini. Derajat ini telah melibatkan aktifitas dialog dengan publik yang berarti warga mempunyai hak untuk didengar aspirasinya meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Derajat tertinggi merupakan kendali masyarakat yang lebih memberikan peluang dalam pembuatan kebijakan.

International Association for Public Participation (IAP2) menyajikan spectrum partisipasi publik dan mengelaborasi kategori *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower* sebagaimana berikut ini:³¹

No.	Kategori	Tujuan	Contoh
1.	<i>Inform</i>	Untuk memberikan informasi ke publik secara seimbang dan objektif yang membantu mereka dalam memahami masalah, alternative dan/atau solusi.	Sosialisasi, <i>open house</i> , laporan keuangan, <i>e-newsletter</i>
2.	<i>Consult</i>	Untuk memperoleh umpan balik dari publik tentang analisis, alternative dan/ atau keputusan.	Sosialisasi/ pertemuan warga komunitas dengan otoritas, <i>online survey</i> .
3.	<i>Involve</i>	Untuk bekerja secara langsung dengan publik selama proses untuk memastikan bahwa masalah dan keprihatinan publik dipahami dan dipertimbangkan secara konsisten.	<i>Community Advisory committee</i> , koordinasi dengan pihak lain
4.	<i>Collaborate</i>	Untuk bermitra dengan publik dalam setiap aspek keputusan	<i>Community Advisory</i>

³¹ Pundarika Vidya Andika, "Mengenal Arnstein's Ladder Dalam Menata Partisipasi Publik," IAP2 Indonesia, 2022, <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>.

		termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang disukai	<i>Commite, Task force</i>
5.	<i>Empower</i>	Untuk menempatkan pengambilan keputusan akhir tangan publik.	<i>Voters on Neighborhood issues.</i>

Sumber: IAP2 (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, maka setidaknya ada dua hal bahwa:

1. Spektrum dari *Inform* ke *empower* dapat mencerminkan partisipasi dari yang cenderung pasif menuju ke partisipasi yang lebih aktif, bahkan komunitas mulai/sudah mempunyai inisiatif (sendiri).
2. Kategori atau spectrum yang terakhir menunjukkan keterkaitan yang erat antara partisipasi dan pemberdayaan; pendekatan *bottom up* dari partisipasi publik berorientasi pada pemberdayaan.

Menurut Slamet, menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Organisasi berbasis masyarakat adalah actor kunci dalam upaya perubahan individu dan kolektif dan berfungsi sebagai perantara antara individu dan komunitas lokal. Dengan cara ini mereka sering menyediakan sarana untuk partisipasi anggota masyarakat, pengembangan kapasitas mereka dan sebagai imbalannya mereka dapat memperoleh manfaat organisasi dari pengetahuan dan informasi anggota lokal. Proses pemberdayaan terdiri dalam mengenali manfaat yang diperoleh individu dan masyarakat dari partisipasi

anggota dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan, mengumpulkan informasi tentang minat mereka dan berbagai pengetahuan lokal.

Mereka menyimpulkan bahwa pemberdayaan dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat, pembangunan kapasitas dan akses ke informasi yang sesuai. Partisipasi terkait dengan kemajuan organisasi lokal yang aktif dan kompeten. Keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan warga yang proaktif meningkatkan kemampuan serta persepsi bahwa bertindak secara kolektif mengarah pada aktualisasi diri.

4. Konsep Masyarakat Nelayan

a. Pengertian Masyarakat Nelayan

Untuk lebih memperjelas pengertian terkait masyarakat nelayan berikut penulis uraikan pengertian dari masyarakat dan nelayan terlebih dulu:

1.) Pengertian Masyarakat

Secara bahasa istilah masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan *society* yang memiliki akar kata dari bahasa latin *socius* yang berarti “kawan”. Sementara dalam bahasa Arab istilah masyarakat berasal dari kata *syaraka* artinya “ikut serta atau berpartisipasi”. Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa masyarakat merujuk kepada sekelompok individu yang saling berinteraksi dalam hubungan sosial, memiliki kesamaan dalam budaya, wilayah, dan identitas.

Menurut Koertjaraningrat, masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu kesatuan kehidupan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu sistem, mengikuti adat istiadat tertentu yang berkelanjutan, dan

terikat oleh rasa identitas bersama³². Menurut Harold J. Laski, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup dan berkolaborasi untuk mewujudkan keinginan bersama mereka.

Dari pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan berinteraksi di dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu dan diikat oleh sistem norma, nilai, dan aturan yang diikuti oleh anggotanya. Struktur masyarakat melibatkan hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang seringkali menjadi bagian integral. Para anggota masyarakat dapat berbagi kesamaan dalam hal budaya, nilai, tradisi, dan identitas, yang menjadi dasar bagi interaksi dan keterkaitan mereka.

2.) Pengertian Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut.³³ Definisi ini menegaskan bahwa pekerjaan utama nelayan berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya laut sebagai mata pencaharian. Selain itu, berdasarkan UU NO. 31 tahun 2004 tentang perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan.³⁴ Definisi ini menekankan aktivitas spesifik nelayan yang meliputi penangkapan ikan di wilayah perairan, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual sebagai sumber pendapatan utama.

³² Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h.19

³³ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Digital Ocean, 2023, <https://kbbi.web.id/nelayan>.

³⁴ "Kamus Hukum Indonesia," n.d., <https://www.kamus-hukum.com/definisi/9797/Nelayan>.

Selain pengertian individu, ada pula konsep masyarakat nelayan, yang merujuk pada komunitas atau kelompok yang sebagian besar anggotanya memiliki profesi menangkap ikan dan tinggal di wilayah pesisir. Menurut penelitian oleh Bailey et al, masyarakat nelayan tidak hanya mencakup mereka yang bekerja dilaut, tetapi juga masyarakat yang secara budaya dan sosial terkait erat dengan kehidupan pesisir. Artinya, meskipun ada individu dalam komunitas tersebut yang mungkin bekerja di sektor lain seperti pertanian atau perdagangan, identitas komunitas tetap melekat pada budaya pesisir dan penangkapan ikan.

Masyarakat nelayan umumnya hidup dalam suatu sistem sosial yang saling bergantung, dengan budaya yang terbentuk dari aktivitas dan tantangan dilaut, seperti keterampilan penangkapan ikan, pengetahuan tentang cuaca, serta siklus musiman ikan. Lingkungan pesisir memberikan karakteristik khusus pada kehidupan mereka, yang berbeda dengan masyarakat pedalaman. Hal ini juga berpengaruh pada pola hidup mereka yang cenderung bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut, sehingga seringkali muncul inisiatif untuk pelestarian lingkungan laut dalam komunitas ini.

Dengan demikian, nelayan dapat diartikan sebagai orang yang berprofesi menangkap ikan di laut, sedangkan masyarakat nelayan adalah sekelompok individu yang tinggal di pesisir dan memiliki budaya serta struktur sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan laut. Perbedaan ini membantu memahami peran nelayan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang bergantung pada ekosistem perairan untuk keberlangsungan hidupnya.

b. Alam Pikir Nelayan

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumber daya perikanan, sebagian besar masyarakat nelayan kita menyukai “hanya mengambil ikan, tanpa berfikir konservasi untuk kepentingan jangka panjang”. Kecenderungan berperilaku demikian merupakan warisan dari mentalitas masyarakat (pemburu dan peramu). Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan eksploitasi tekanan –tekanan terhadap sumber daya perikanan terus pula meningkat. Akibatnya, berkembanglah di beberapa kawasan tentang persaingan intensif dan konflik diantara kelompok-kelompok nelayan dalam merebutkan sumber daya perikanan.

Sepanjang upaya-upaya masih bisa dilakukan dan terbesit harapan masih berpeluang diraih, nelayan tetap memiliki daya juang yang tinggi untuk terus melaut dan bertahan hidup. Berbagai siasat dan keragaman beradaptasi diciptakan oleh nelayan untuk menghadapi kesulitan sosial ekonomi. Dasar motivasi lain adalah untuk mencapai kesuksesan hidup, yakni kemampuan menghimpun penguasaan sumber daya materi duniawi dan ukhrowi yang tertampakan, seperti tempat tinggal yang bagus, emas yang banyak, skala usaha keluarga yang besar, dan telah memenuhi haji. Symbol-simbol demikian menjadi basis untuk membangun status dan gengsi sosial, sebagai salah satu iri utama kebudayaan masyarakat pesisir.³⁵

c. Klasifikasi Nelayan

Ditjen perikanan mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan, yaitu:

³⁵ Dkk Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: PSKP, 2019), h.34

- 1.) Nelayan/ petani penuh, yaitu nelayan/ petani ikan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya.
- 2.) Nelayan/petani ikan sambilan utama, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya.

5. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan konsep yang mencakup cara keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomia*, yang merupakan gabungan dari dua kata: *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan atau pengelolaan). Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi tidak hanya terbatas pada pengelolaan rumah tangga, tetapi juga berlaku dalam skala kelompok sosial yang lebih besar, seperti desa, kota, bahkan negara. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan di berbagai tingkatan masyarakat.

Ekonomi keluarga lebih spesifik membahas bagaimana setiap anggota keluarga, seperti ayah, ibu, dan anak, memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan keluarga secara ekonomi. Setiap anggota diharapkan untuk menjalankan hak dan kewajibannya agar tercipta keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Misalnya, orang tua biasanya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, anak-anak yang sedang menempuh pendidikan memiliki kewajiban untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Apabila salah satu anggota keluarga tidak menjalankan tugas atau perannya, kesejahteraan keluarga tersebut bisa terganggu, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas sosial di dalam masyarakat.

Dalam ekonomi keluarga, unsur-unsur utama seperti penghasilan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan memegang peranan penting. Penghasilan keluarga yang berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, usaha, atau investasi, menjadi modal utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan ini mencakup pendidikan, kesehatan, serta pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan pandangan Slameto, tingkat ekonomi keluarga yang rendah dapat berdampak negatif pada pendidikan anak, misalnya, kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok anak dapat mengganggu kesehatannya dan berdampak buruk pada proses belajarnya. Beberapa dampak negatif lainnya antara lain berkurangnya kesejahteraan keluarga secara umum, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta kesulitan dalam menyediakan perlengkapan belajar bagi anak-anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan anak terpaksa putus sekolah dan membatasi peluang masa depannya.

Sebaliknya, ekonomi keluarga yang kuat atau sejahtera memberikan berbagai manfaat positif, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Tingkat ekonomi yang baik memungkinkan keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Selain itu, keluarga yang sejahtera memiliki kemampuan finansial untuk menyekolahkan anak hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang keberhasilan anak di masa depan. Kesejahteraan yang dihasilkan dari ekonomi keluarga yang baik juga berdampak pada kemakmuran keluarga secara keseluruhan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kesehatan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan keluarga.

Secara keseluruhan, ekonomi keluarga adalah bagian integral dari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pengelolaan aktivitas ekonomi yang seimbang dan berkesinambungan. Indikator-indikator penting dalam ekonomi keluarga meliputi pendapatan, pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dengan demikian, ekonomi keluarga tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup keluarga secara individu tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebiato dalam buku karya Hamid menganggap bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses yang merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan potensi serta keunggulan komunitas yang kurang berdaya dalam masyarakat termasuk diantaranya individu-individu yang menghadapi tantangan kemiskinan.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan cara ini, diharapkan dapat lebih menjamin berlanjutan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian langsung terhadap sumberdaya pesisir dan laut yang melibatkan penduduk.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan menjadi landasan untuk membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini, pentingnya dukungan berkualitas dari sumberdaya manusia dan optimalisasi fungsi kelembagaan sosial-ekonomi dalam kehidupan warga tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang dapat diukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Hal ini perlu mempertimbangkan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.

Pencapaian tujuan pemberdayaan dapat optimal apabila terjadi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumberdaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa prinsip filosofis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. alam yang terdapat di kawasan pesisir merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga keberlanjutannya oleh seluruh pihak. Pengelolaan sumberdaya ini sebaiknya dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
- b. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut seharusnya dilakukan oleh masyarakat pengguna dengan sikap berhati-hati, berfokus pada kepentingan masa depan. Tindakan ini sebaiknya didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan kepedulian terhadap generasi penerus mereka.
- c. Negara memiliki tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin realisasi hak-hak warga terkait akses terhadap sumberdaya ekonomi dan lingkungan. Ini merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- d. Negara memikul tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan memastikan realisasi hak-hak warga terkait akses terhadap sumberdaya ekonomi dan lingkungan. Langkah ini diambil sebagai usaha untuk menjaga keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah pesisir.

³⁶ Sufi, Strategi Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Muara Batu, (Unimal Press, 2019), h.38

- e. Tanggung jawab untuk melindungi keberlanjutan sumberdaya alam dari berbagai ancaman ada pada Negara, masyarakat, dan pihak lain.

Untuk mencapai pencapaian pemberdayaan yang cukup signifikan, dasar pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir sebaiknya diletakkan pada tingkat keluarga atau rumah tangga. Penguatan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat memperkuat integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

2. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan di laut dan hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal dipedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya masyarakat pantai.

3. Peningkatan ekonomi keluarga

Maksud utama dari pemberdayaan masyarakat sering kali adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Berbagai program pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, umumnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya ini terus diperkuat dan diperluas sejalan dengan perkembangan zaman dan persaingan global, dengan tujuan agar masyarakat tetap berdaya saing dan tidak terpinggirkan dalam era teknologi yang terus berkembang pesat.

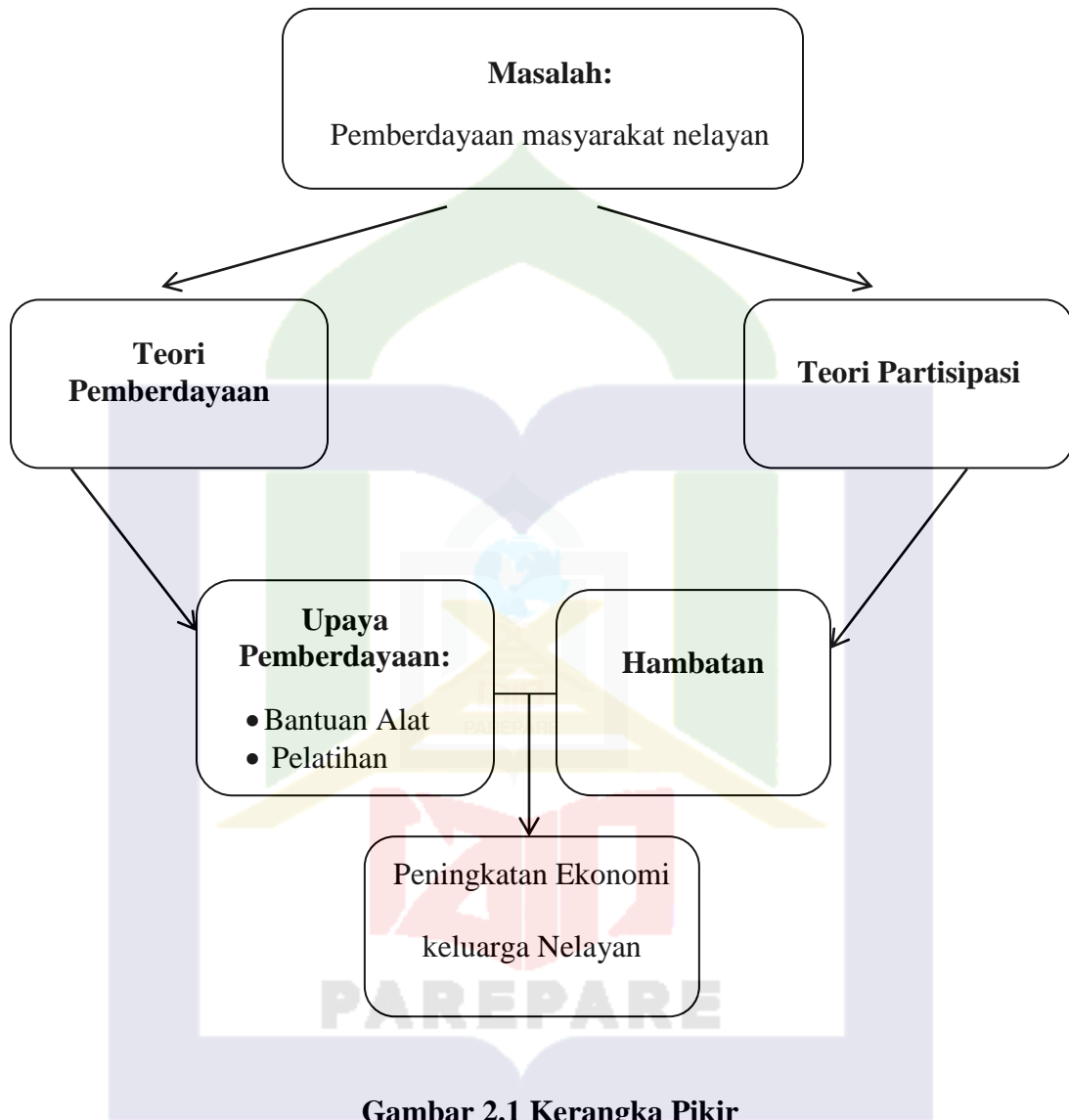
Secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan

agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antara variable yang satu dengan variable lainnya.³⁷ Pada penelitian ini penulis membahas mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Dimana yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu masyarakat nelayan yang berada di desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif agar penulis dapat menggambarkan mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Kupa dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat.

³⁷ Muhammad Kamal Zubair, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk menyelidiki fenomena sosial pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa. Pendekatan kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Creswell dalam Murdiyanto merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap masalah manusia dan fenomena sosial.³⁸ Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dan pengalaman individu atau kelompok dalam situasi sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif tidak hanya mencari jawaban atas "apa" yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi, dari sudut pandang mereka yang terlibat secara langsung. Lebih lanjut, Taylor dalam Murdiyanto menambahkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁹

Peneliti memilih metode kualitatif karena metode kualitatif sangat relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, seperti proses pemberdayaan, yang melibatkan interaksi sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana nelayan dan pemangku kepentingan memaknai program-program yang diterapkan, serta bagaimana program tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi mereka.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memahami pengalaman subjektif dan kompleks yang dialami oleh masyarakat nelayan dalam konteks

³⁸Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h.19

³⁹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h.20

pemberdayaan ekonomi keluarga. Peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks mengenai proses pemberdayaan ini dengan melakukan pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis terhadap kata-kata dan pandangan responden. Data yang dikumpulkan akan menggambarkan realitas alami tanpa manipulasi, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell, dimana peneliti akan mendokumentasikan laporan terinci dari pandangan para nelayan, penyuluh perikanan dan pemerintah desa sebagai actor-aktor utama dalam proses pemberdayaan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kupa, yang merupakan sebuah desa pesisir yang terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Desa ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Alasan saya memilih Desa Kupa sebagai lokasi penelitian adalah karena adanya program pemberian bantuan dan pelatihan yang ditujukan terhadap masyarakat nelayan. Dengan meneliti desa Kupa, saya dapat mengevaluasi efektivitas program tersebut dan memahami bagaimana pelatihan serta bantuan yang diberikan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga nelayan.

Secara administratif Desa Kupa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Desa ini memiliki luas wilayah $\pm 20,23$ km² yang berbatasan langsung dengan wilayah berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojo.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Mallawa.
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Nepo.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Desa Kupa memiliki 3 dusun dan 10 RT yaitu Dusun Kupa, Dusun Buaka, dan Dusun Labuange. Secara geografis, ketinggian tanah wilayah desa kupa berada 3 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata antara 30 ° – 31 ° C dengan curah hujan rata-rata 1934mm/tahun.

Secara demografi tercatat jumlah penduduk desa kupa sekitar 2896 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1424 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1472 serta terdapat sejumlah 872 kepala keluarga.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kupa

Nama Dusun	Jumlah Jiwa		Total Jiwa
	L	P	
Kupa	520	568	1088
Buaka	362	357	719
Labuange	542	547	1089
Jumlah	1424	1472	2896

Sumber Data: Profil Desa Kupa Tahun 2022

Tabel 3.2 Jumlah Kepala Keluarga Desa Kupa

Nama Dusun	Jumlah KK
Kupa	370
Buaka	187
Labuange	315
Jumlah	872

Sumber Data: Profil Desa Kupa Tahun 2022

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kupa

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	182 orang
2.	Tidak Sekolah	861 orang
3.	Masih SD	206 orang
4.	Tamat SD	478 orang
5.	Masih SMP	78 orang
6.	Tamat SMP	230 orang
7.	Masih SMA	153 orang

8.	Tamat SMA	649 orang
9.	S-1	59 orang

Sumber Data: Profil Desa Kupa Tahun 2022

Dari data tingkat pendidikan masyarakat diatas, terlihat bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penduduk desa Kupa berada pada tingkat pendidikan dasar, yaitu SD (206 orang masih SD dan 478 orang tamat SD). Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang telah mendapatkan akses ke pendidikan dasar, masih ada sebagian yang belum mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menengah (SMP dan SMA) mulai menurun, dengan jumlah yang masih SMP dan SMA lebih sedikit dibandingkan yang telah tamat. Hanya 230 orang yang tamat SMP dan 649 orang yang tamat SMA. Dari data tersebut juga menunjukkan hanya sedikit orang yang mencapai pendidikan tinggi (S-1), yaitu hanya 59 orang.

Sehingga secara umum, data ini mencerminkan tantangan yang signifikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di masyarakat tersebut. Mayoritas penduduk hanya memiliki pendidikan dasar, dengan sedikit yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan peluang ekonomi masyarakat di masa depan.

Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Kupa

Uraian	Dusun			Total Jiwa
	Kupa	Buaka	Labuange	
Karyawan Swasta	54	38	97	189
Wiraswasta	63	26	126	215
Petani/Pekebun	134	86	0	220
Buruh Migran	42	6	12	60
Nelayan	38	147	263	448
Lainnya	68	135	171	374
Belum/Tidak Bekerja	689	281	420	1390
Jumlah	1088	719	1089	2896

Sumber Data: Profil Desa Kupa 2022

Desa Kupa memiliki ketergantungan yang besar pada sektor perikanan dan pertanian yang merupakan sektor-sektor utama bagi mata pencaharian penduduknya. Namun, tingginya jumlah penduduk yang belum atau tidak bekerja menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Keberagaman pekerjaan lain menunjukkan bahwa meskipun perikanan dan pertanian dominan, ada sektor-sektor lain yang juga penting bagi perekonomian desa.

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Desa Kupa

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Prasarana umum:	
	a. Kantor Desa	1
	b. LKMD/LPM	1
	c. Masjid	4
	d. Mushollah	2
	e. Lapangan sepak bola	2
	f. Lapangan volley	2
	g. Restoran	4
	h. Prasarana hiburan dan wisata	1
	i. Tempat pembuangan sementara (TPS)	1
2.	Prasarana pendidikan:	
	a. Gedung SMP	1
	b. Gedung SD	2
	c. Gedung TK	1
	d. Perpustakaan Desa	1
3.	Prasarana kesehatan:	
	a. Posyandu	6
	b. Puskesmas pembantu (PUSTU)	1

Sumber Data: Profil Desa Kupa 2022

Prasarana umum seperti kantor desa, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga menunjukkan bahwa desa mendukung aktivitas sosial, religious, dan rekreasi masyarakat. Fasilitas pendidikan tersedia di berbagai jenjang, mulai dari TK hingga SMP, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap pendidikan anak-anak di desa. Selain itu, prasarana kesehatan seperti posyandu dan puskesmas pembantu juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar masyarakat. Dengan adanya berbagai fasilitas ini, Desa Kupa memiliki potensi untuk terus meningkatkan kualitas hidup warganya dalam berbagai aspek, meskipun tetap memerlukan pengelolaan yang baik dan upaya peningkatan dalam beberapa bidang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan selang waktu kurang lebih selama 1 (satu bulan) setelah peneliti melakukan seminar proposal dan disetujui oleh dosen pembimbing.

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan ekonomi keluarga di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan tipe data dalam penelitian yang menitikberatkan pada informasi yang diperoleh dari pernyataan atau tanggapan informan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti.⁴⁰ Tipe data ini tidak dapat diungkapkan secara numerik, karena data ini sifatnya deskriptif yakni menggambarkan karakteristik, sifat, atau konteks suatu fenomena dalam bentuk kata-kata atau cerita. Data kualitatif biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁴⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: C. Harva Creative, 2023), h.91

Sumber data yaitu kata yang merujuk pada tempat atau asal sebuah informasi atau data diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut data-data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya untuk tujuan penelitian tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan pengamatan langsung, interaksi dengan subjek penelitian, atau pengukuran langsung oleh peneliti atau tim penelitian. Data primer digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis tertentu. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui berbagai metode, tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan yang ingin dijawab. Untuk penelitian ini sendiri, penulis menggunakan data primer berupa catatan hasil wawancara bersama masyarakat nelayan dan pemerintah desa, serta catatan hasil observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain atau dari sumber yang sudah ada sebelumnya, data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis ulang, mengevaluasi, atau membuat kesimpulan baru. Data ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan lapangan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sumber data sekunder dapat bervariasi, termasuk publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel, dan skripsi, serta basis data, laporan resmi pemerintah, data industry, survey yang dilakukan lembaga lain, atau hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang akan digunakan mencakup publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel, dan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah atau fokus dari penelitian ini maka penulis memerlukan sebuah data yang berkualitas. Untuk memperoleh data-data yang berkualitas maka penulis harus menggunakan teknik khusus dalam rangka mengumpulkan data. Tanpa teknik penulis akan sulit mengumpulkan data yang sesuai dengan standar. Berdasarkan hal tersebut, berikut teknik penulis dalam melakukan pengumpulan data:

1. Observasi

Cartwright dalam Murdiyanto mendefinisikan observasi sebagai suatu “proses pengamatan yang melibatkan melihat, mengamati, dan mencermati perilaku dengan tujuan tertentu”.⁴¹ Observasi merupakan suatu teknik penelitian yang melibatkan pengamatan terstruktur dan cermat terhadap fenomena atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian ilmiah, observasi sering diterapkan untuk menghimpun informasi mengenai peristiwa alamiah atau interaksi langsung antara individu.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, artinya peneliti mengamati lingkungan atau aktivitas masyarakat nelayan dan pemerintah desa tanpa terlibat langsung dalam aktivitas mereka. Peneliti hanya menjadi pengamat pasif yang mencatat peristiwa atau keadaan di lapangan dari luar, tanpa terlibat atau berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian dalam aktivitas sehari-hari mereka. Dengan observasi non-partisipan, peneliti dapat menjaga jarak dari objek yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati secara objektif, tanpa memengaruhi atau terpengaruh oleh kegiatan atau dinamika di lingkungan sosial yang sedang diamati.⁴²

⁴¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif: Sistematika Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yoyakarta Press, 2020), h.54

⁴² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harva Creative, 2023). h. 97

2. Wawancara

Metode wawancara adalah pendekatan umum dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dari subjek atau responden. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara pewawancara (peneliti) dan responden dengan tujuan menggali informasi berupa pandangan, pengalaman, dan sikap responden terkait dengan topik penelitian.

Dalam mengumpulkan informasi terkait pemberdayaan masyarakat nelayan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dimana Pewawancara menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengikuti urutan yang sama untuk setiap responden. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keobjektifan dalam proses pengumpulan data. Adapun informan pada penelitian ini yakni Kepala desa, penyuluh perikanan, dan 3 nelayan.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperkuat keyakinan dan pembuktian suatu kejadian. Kredibilitas atau kepercayaan hasil observasi atau wawancara dapat ditingkatkan apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data menjadi hal yang sangat penting dalam seluruh proses penelitian. Keyakinan terhadap keandalan data yang diperoleh penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi yang berarti untuk memahami dengan lebih dalam konteks yang diteliti. Terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk menilai keabsahan dan kualitas dari hasil

temuan penelitian, diantaranya yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *Confirmability*.⁴³

1. *Credibility* (Kepercayaan): *Credibility* merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan sudut pandang partisipan atau informan yang terlibat. Kepercayaan dapat diperkuat dengan menggunakan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode atau sumber data untuk memverifikasi temuan. Refleksi diri dan kehadiran peneliti di lapangan juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap interpretasi dan hasil penelitian.
2. *Transferability*: mengevaluasi kemungkinan generalisasi temuan penelitian dalam populasi atau konteks lain yang tidak sama dengan fokus penelitian awal. Proses ini melibatkan pertimbangan terhadap perbedaan dalam konteks, populasi, dan kondisi yang mungkin mempengaruhi relevansi hasil penelitian di berbagai konteks.⁴⁴ Pengujian keabsahan data menggunakan transferabilitas dapat merujuk pada proses menguji apakah model atau hasil analisis yang telah dihasilkan tetap valid atau memiliki keabsahan saat diterapkan pada situasi atau data yang berbeda.
3. *Dependability* (*Dependability*): Proses penelitian dievaluasi melalui audit menyeluruh, yang dilakukan oleh seorang auditor independen atau pembimbing. Auditor ini mengevaluasi semua langkah penelitian, mulai dari pemilihan fokus atau masalah, pengumpulan data di lapangan, penentuan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, hingga pembuatan kesimpulan. Semua tahapan ini harus dipertanggungjawabkan oleh peneliti.⁴⁵ Uji *Dependability* harus menunjukkan konsistensi dan keandalan hasil penelitian dari waktu ke waktu. Peneliti harus secara jelas

⁴³ Murdiyanto, Eko, Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif), Yogyakarta Press (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h. 68.

⁴⁴ Harahap, Nursapia, Penelitian Kualitatif, (Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), h.88

⁴⁵ Murdiyanto, Eko, Metode Penelitian Kualitatif: Sistematika Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h.72

mendokumentasikan langkah-langkah metodologis yang diambil, termasuk proses pengumpulan data dan analisis, agar penelitian dapat direplikasi atau diverifikasi oleh peneliti lain.

4. **Confirmabilitas (*Confirmability*)**: berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian didasarkan pada data empiris dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau bias peneliti. Untuk memastikan confirmabilitas, peneliti harus menjaga objektivitas dan menghindari interpretasi yang terlalu subjektif yang tidak didukung oleh data. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmabilitas memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas, sehingga keduanya dapat diuji secara bersamaan.

Untuk mencapai kriteria keabsahan tersebut peneliti akan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji data atau informasi yang diperoleh, yakni melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggabungan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada. Saat peneliti menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, mereka sebenarnya mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai teknik untuk menguji kepercayaan (kredibilitas) data. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk memverifikasi dan mengonfirmasi keabsahan data dengan pendekatan yang lebih komprehensif, melalui pengumpulan informasi dari sudut pandang yang berbeda dan menggunakan metode yang beragam.

G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, setelah mengumpulkan data-data dari lapangan tahap berikutnya yang perlu dilakukan yakni menganalisis data. Sugiyono dalam buku karya Abd Hadi dkk menyatakan bahwa teknik analisis data merupakan suatu rangkaian proses pengumpulan data yang melibatkan pencarian, penyusunan, dan pengorganisasian data secara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi.⁴⁶ Analisis data merupakan proses penyelidikan dan penafsiran data guna agar memperoleh pemahaman mendalam terkait data yang ditemukan dilapangan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Proses tersebut mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, penjabaran dalam unit-unit, sintesis, pembentukan pola, pemilihan informasi yang signifikan, serta penarikan kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan.

Proses analisis data kualitatif dimulai sejak tahap pengumpulan data dan terus berlanjut setelah pengumpulan selesai. Jadi selama proses wawancara berlangsung, peneliti melakukan analisis awal terhadap jawaban dari informan. Apabila informasi dari informan dirasa masih belum bisa menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan guna memperoleh data yang berkualitas. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, dalam hal penganalisisan data ini penulis menggunakan model analisis yang telah dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Model analisis tersebut disebut dengan metode analisis data interaktif. tahapan dalam metode analisis tersebut mencakup langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data

Dalam proses penelitian, tidak dipungkiri jika di lapangan peneliti akan menemukan beragam data dan seringkali kompleks. Oleh karena itu reduksi data penting dilakukan untuk menyederhanakan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Data tersebut diantaranya didapatkan dari sumber seperti hasil observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memfokuskan perhatian peneliti pada hal-hal yang penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan upaya menyajikan informasi atau hasil analisis secara terstruktur dan jelas. Adapun tujuan utama penyajian data ini adalah

⁴⁶ Abd Hadi, Asrori, dan Rusman, Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2021), h.68

memudahkan pemahaman, interpretasi, dan pengambilan keputusan bagi pembaca atau penerima informasi. Ada berbagai bentuk penyajian data, seperti teks naratif, tabel, grafik, matriks, atau bagan, yang dipilih berdasarkan konteks jenis data dan maksud komunikasi.

Dalam konteks ini, penulis akan menampilkan informasi dalam bentuk teks dan untuk lebih mengklarifikasi hasil penelitian akan disertai dengan tabel atau gambar. Untuk melakukan penyajian data peneliti mengkategorikan unsur-unsur yang serupa ke dalam kelompok atau kategori berurutan, seperti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Setiap kelompok mencerminkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, dan dalam proses ini, klasifikasi dilakukan berdasarkan tema-tema relevan.⁴⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian atau analisis, di mana peneliti merumuskan simpulan atau generalisasi berdasarkan hasil temuan dari data dan analisis yang telah dilaksanakan. Proses ini mewakili sintesis informasi yang telah ditemukan atau disajikan selama rangkaian penelitian, dengan tujuan merumuskan pandangan atau pemahaman yang lebih luas terkait dengan pertanyaan penelitian atau tujuan awal penelitian.

Peneliti secara berkelanjutan melakukan upaya penarikan kesimpulan selama berada di lapangan. Kesimpulan-konklusi ini dihadapi dengan sikap yang fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, meskipun sejumlah kesimpulan telah dihasilkan. Awalnya mungkin belum sepenuhnya jelas, namun seiring waktu, kesimpulan tersebut berkembang menjadi lebih rinci dan kokoh.

⁴⁷ Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif: Sistematisasi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h.83

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti kemudian melakukan proses interpretasi atau analisis terhadap data tersebut untuk memahami hasil-hasil yang telah didapatkan. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan topic penelitian, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan data lapangan yang konkret untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut dalam menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam studi ini.

1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam prosesnya. Konsep ini dianggap sebagai paradigma baru, karena pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi, tetapi juga mengutamakan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas individu dalam masyarakat. Dalam pemberdayaan, fokus utamanya adalah pada pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan kesempatan berusaha yang relevan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat diakui memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengakuan bahwa setiap orang dan setiap komunitas mempunyai keunikan dan kekuatan sendiri yang perlu dihargai dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan adalah serangkaian tindakan atau program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan peran aktif nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Upaya ini bertujuan agar

dapat memperkuat posisi sosial dan ekonomi nelayan, sehingga mereka mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam sektor perikanan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Suardi Haruna S.E , selaku kepala desa Kupa menyatakan bahwa:

“ Sebagai pemerintah desa, kami melihat.bahwa mayoritas penduduk Desa Kupa adalah nelayan yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama saat musim paceklik atau ketika hasil tangkapan menurun. Oleh karena itu, program pemberdayaan ini diinisiasi untuk membantu masyarakat nelayan meningkatkan keterampilan, mengelola sumber daya, dan mencari alternative mata pencaharian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Program ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan.” (wawancara 17 Juli 2024)⁴⁸

Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah desa mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Seperti yang disampaikan lebih lanjut oleh Pak Desa dalam wawancara berikut, program pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan peralatan tetapi juga melibatkan pelatihan yang dapat meningkatkan produktivitas nelayan.

“ kami melaksanakan berbagai bentuk pemberdayaan, seperti pelatihan pengolahan hasil tangkapan agar produk nelayan memiliki nilai tambah. Selain itu, kami memberikan bantuan peralatan perikanan berupa alat tangkap (jaring) dan mesin katinting agar hasil tangkapan lebih maksimal” (wawancara 17 Juli 2024)⁴⁹

1.1 Bantuan Peralatan Kepada Nelayan

Bantuan peralatan kepada nelayan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat nelayan. Bantuan peralatan perikanan merupakan program yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan melalui pemberian berbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan ikan. Alat tangkap

⁴⁸ Suardi Haruna, Kepala Desa, Wawancara di Desa Kupa, 17 Juli 2024.

⁴⁹ Suardi Haruna, Kepala Desa, Wawancara di Desa Kupa, 17 Juli 2024.

adalah perangkat yang dibunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dan organisme laut lainnya. Alat penangkapan ini bertujuan untuk membantu nelayan dalam meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan mereka. Ala-alat penangkapan ikan yang umum diberikan meliputi jaring

Bantuan ini tidak diberikan secara serentak kepada semua nelayan, melainkan dilakukan secara bergiliran. Setiap nelayan akan menerima bantuan berupa jarring, namun mereka harus menunggu sesuai giliran. Selain itu, untuk mendapatkan bantuan nelayan harus mengajukan proposal dan proses pengajuan tersebut harus dilakukan dalam kelompok, dimana anggota kelompok di tentukan oleh masyarakat nelayan sendiri. Atau dengan kata lain program ini bersifat kolektif dan terorganisir, serta membutuhkan kerjasama antara nelayan agar mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama dengan bapak Suardi Haruna, selaku kepala Desa Kupa beliau mengatakan bahwa:

“ Sejauh ini tidak ada strategi yang khusus untuk memberdayakan nelayan, akan tetapi dari kita memberikan bantuan peralatan perikanan untuk para nelayan berupa alat tangkap (jaring). Bantuan-bantuan ini kita berikan secara bergiliran dan bantuan menjadi hak sepenuhnya untuk para nelayan.”(wawancara 17 Juli 2024)⁵⁰

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak ada upaya strategis lain selain pemberian alat tangkap untuk mendukung nelayan. Bantuan diberikan secara berkala dan diharapkan bisa mendukung produktivitas nelayan dalam jangka pendek. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Tamrin selaku penyuluh perikanan desa Kupa beliau menjelaskan bahwa:

“ Para nelayan yang ingin mendapatkan bantuan peralatan perikanan harus mengajukan proposal yang akan langsung dikirim ke pusat. Tidak ada persyaratan lain untuk mendapatkan bantuan, hanya saja mereka perlu membentuk kelompok. Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari upaya

⁵⁰ Suardi Haruna, Kepala, Wawancara di Desa Kupa, 17 Juli 2024.

pemberdayaan dari luar dengan memberikan fasilitas.” (wawancara 17 juli 2024)⁵¹

Pernyataan dari kedua informan tersebut menunjukkan bahwa bantuan peralatan perikanan merupakan bagian dari program pemberdayaan yang bersifat *top-down*, dimana pemerintah menyediakan fasilitas berupa peralatan, namun peran aktif nelayan terbatas pada pengajuan proposal dan pembentukan kelompok. Berdasarkan dari pernyataan informan tersebut, bahwa untuk mendapatkan bantuan peralatan perikanan, nelayan harus mengajukan proposal dan membentuk kelompok, tanpa persyaratan tambahan lainnya. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan melalui pemberian fasilitas.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Mujahidin selaku nelayan yang membenarkan adanya bantuan peralatan perikanan yang diberikan oleh pemerintah, beliau mengatakan bahwa:

“.... Memang benar kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi hanya berupa alat tangkap tidak ada bantuan lainnya selain itu, dan itu kami dapatkan setelah membuat proposal dan diajukan barulah mendapatkan bantuan”(wawancara 19 Juli 2024)⁵²

Selain itu, beberapa nelayan lainnya juga mengonfirmasi hal yang serupa bahwa bantuan yang diterima terbatas pada peralatan tertentu, seperti jaring atau mesin ketinting.

“ saya dapat bantuan jaring karena jaring yang sering saya pakai sudah banyak robeknya sudah tidak bisa untuk diperbaiki dan setelah mendapat bantuan tersebut bisa membantu kami dalam menangkap ikan”(wawancara bapak Hamuddin 19 juli 2024)⁵³

“saya hanya mendapatkan mesin ketinting saja dari pak desa. Karena usulan saya waktu itu mesin ketinting. Kalau ada mesin ketinting saya bisa mencari

⁵¹ Tamrin, Penyuluh Perikanan, Wawancara di Dusun Labuange, 17 Juli 2024

⁵² Mujahidin, Nelayan, Wawancara, 19 Juli 2024

⁵³ Hamuddin, Nelayan, Wawancara, 19 Juli 2024

ikan sampai ketempat yang lebih jauh sehingga saya bisa menemukan tempat-tempat yang ikannya banyak” (Wawancara bapak Guntur 19 Juli 2024)⁵⁴

Adapun dari hasil wawancara di atas bahwa tidak ada strategi yang khusus untuk pemberdayaan nelayan miskin, hanya saja berupa pemberian alat tangkap dan mesin katinting. Bantuan ini sendiri sangat membantu para nelayan dalam mencari ikan dan dengan adanya. Hasil wawancara dengan para nelayan desa Kupa menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah telah memberikan peralatan seperti jaring dan mesin ketinting, namun bantuan ini terbatas pada jenis peralatan tertentu dan distribusinya tidak merata. Sebagian besar nelayan mengandalkan bantuan jaring, sementara nelayan dengan perahu yang lebih besar menerima mesin ketinting. Meski bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas penangkapan ikan, hanya sedikit nelayan yang mendapatkan bantuan tambahan atau lebih dari satu kali.

1.2 Pelatihan

Program pelatihan nelayan di Desa Kupa bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara lebih efektif dan berkelanjutan. Program ini sering kali mencakup berbagai aspek seperti teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengolahan hasil laut.

“Pemerintah desa sangat berkomitmen dalam mendukung program pelatihan untuk masyarakat nelayan. Kami bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dinas perikanan dan penyuluh perikanan untuk memastikan bahwa nelayan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya agar nelayan kita dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya sehingga ekonomi keluarga mereka juga bisa meningkat.” (wawancara Kepala Desa 17 Juli 2024)⁵⁵

“materi yang kami berikan cukup beragam, mulai dari teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta pengolahan hasil tangkapan”. (wawancara Penyuluh Perikanan 17 Juli 2024)⁵⁶

Selain bantuan peralatan, program pelatihan keterampilan merupakan komponen vital dalam upaya pemberdayaan nelayan. Pelatihan ini mencakup

⁵⁴ Guntur, Nelayan, Wawancara, 19 Juli 2024

⁵⁵ Suardi Haruna, Kepala, Wawancara di Desa Kupa, 17 Juli 2024.

⁵⁶ Tamrin, Penyuluh Perikanan, Wawancara di Dusun Labuange, 17 Juli 2024

berbagai aspek yang dirancang untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan nelayan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada cara-cara tradisional dalam menangkap ikan, tetapi juga mampu mengadopsi teknik-teknik baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama pelatihan adalah pada teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Dimana nelayan diajarkan tentang cara menggunakan jaring yang lebih selektif sehingga mereka hanya menangkap ikan yang dibutuhkan tanpa merusak ekosistem laut seperti terumbu karang atau menangkap spesies ikan yang sedang dilindungi. Dengan teknik ini, kelestarian sumber daya laut bisa terjaga, dan nelayan tetap bisa menikmati hasil tangkapan yang baik di masa depan.

Selain teknik penangkapan, pelatihan juga mencakup cara-cara pengolahan hasil laut. Nelayan dan keluarganya diajari bagaimana mengolah hasil tangkapan menjadi produk olahan bernilai tambah seperti ikan asin. Ini sangat penting, terutama bagi komunitas nelayan. Dengan mengolah hasil laut menjadi produk olahan, nelayan bisa mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, dan dapat memperpanjang umur simpan produk.

2. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Berdasarkan wawancara, teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan, baik dari sudut pandang pemerintah desa, penyuluh perikanan, maupun nelayan

2.1 Faktor Eksternal

2.1.1 Kurangnya Jumlah Bantuan dan Anggaran

Salah satu hambatan internal dari pemerintah yaitu kurangnya anggaran yang diberikan, anggaran yang diberikan cenderung sedikit sehingga tidak semua nelayan mendapatkannya, hanya nelayan terpilih saja yang mendapatkan bantuan tersebut.

Anggaran yang disalurkan untuk masyarakat tidak berupa uang akan tetapi berupa alat tangkap, sehingga masyarakat hanya menerima bantuan berupa benda.

Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang kami miliki. Anggaran yang disediakan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan sering kali tidak cukup untuk mencakup semua kebutuhan nelayan, baik dari segi perlengkapan, maupun pelatihan. Selain itu, alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah sering kali terbatas dan tidak selalu tepat waktu.

“ selama ini bantuan yang diberikan sangat terbatas, masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan, anggaran yang diberikan kepada nelayan berupa perlengkapan tidak bisa dibagikan dengan rata, hanya kelompok-kelompok yang terpilih saja yang bisa mendapatkan bantuan, dan kita tidak bisa memprediksikan kapan bantuan tersebut akan disalurkan kembali” (wawancara bapak tamrin selaku penyuluh perikanan 17 Juli 2024)⁵⁷

Kutipan wawancara tersebut menggambarkan beberapa masalah utama dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat nelayan. Bantuan yang diberikan dirasakan sangat terbatas, yang menunjukkan bahwa jumlah atau jenis bantuan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan, menandakan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan tersebut. Selain itu, ada isu ketidakmerataan dalam pembagian anggaran. Bantuan berupa perlengkapan tidak dapat dibagikan secara merata. Dimana hanya kelompok-kelompok tertentu yang terpilih yang bisa menerima bantuan. Ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi atau favoritisme dalam proses pemberian bantuan yang bisa berdampak pada ketidakpuasan dan ketidakadilan diantara nelayan. Yang terakhir, adanya ketidakpastian terkait waktu penyaluran bantuan di masa depan. Nelayan tidak bisa memprediksi kapan bantuan akan datang lagi, sehingga mereka sulit merencanakan langkah kedepan atau mengandalkan bantuan tersebut secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka.

⁵⁷ Tamrin, Penyuluh Perikanan, Wawancara di Dusun Labuange, 17 Juli 2024

2.2 Faktor Internal

2.2.1 Kurangnya Partisipasi masyarakat

Dari perspektif Pemerintah Desa, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan terbesar dalam memberikan dukungan yang optimal kepada seluruh nelayan di desa.

"Keterbatasan anggaran adalah salah satu kendala utama, sehingga kami tidak bisa memberikan semua nelayan alat yang sama dalam waktu singkat,"

ungkap salah satu pejabat desa. Selain itu, pemerintah desa juga mengakui adanya kesulitan akses pasar yang membuat hasil tangkapan nelayan sulit terjual dengan harga yang layak, yang tentunya memengaruhi pendapatan nelayan.

"Kurangnya akses pasar membuat hasil tangkapan sulit dijual dengan harga yang layak," lanjut pejabat tersebut.

Penyuluh Perikanan juga menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait dengan waktu dan keterbatasan sumber daya. Nelayan sering kali kesulitan untuk mengikuti sesi pelatihan atau pendampingan karena mereka harus melaut setiap hari.

*"Waktu nelayan yang terbatas membuat mereka sulit untuk mengikuti semua sesi pendampingan, karena mereka harus melaut setiap hari,"*⁵⁸

jelas penyuluh perikanan. Selain itu, penyuluh perikanan mengamati bahwa beberapa nelayan kesulitan beradaptasi dengan alat tangkap baru karena belum terbiasa menggunakan teknologi modern.

*"Ada juga kendala adaptasi dengan teknologi baru, karena beberapa nelayan belum terbiasa dengan alat yang lebih modern,"*⁵⁹ tambahnya.

⁵⁸ Tamrin, Penyuluh Perikanan, Wawancara di Dusun Labuange, 17 Juli 2024

⁵⁹ Tamrin, Penyuluh Perikanan, Wawancara di Dusun Labuange, 17 Juli 2024

Di pihak Nelayan, tantangan utama yang mereka rasakan adalah sulitnya mengatur waktu antara kegiatan pelatihan dan aktivitas melaut, yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Salah seorang nelayan mengungkapkan,

*“Kami kadang kesulitan ikut pelatihan, karena waktunya bentrok dengan jadwal melaut.”*⁶⁰

Selain itu, nelayan juga menyebutkan masalah keterbatasan akses pasar, sehingga meskipun mereka telah berhasil meningkatkan hasil tangkapan, kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapan tersebut tetap ada.

*“Akses pasar masih sulit, jadi meskipun kami dapat tangkapan lebih banyak, belum tentu bisa dijual dengan baik,”*⁶¹ kata seorang nelayan.

Dari konsistensi pernyataan ini, terlihat bahwa kendala pelaksanaan program pemberdayaan melibatkan faktor anggaran, waktu, keterbatasan sumber daya, dan akses pasar. Kendala-kendala ini perlu mendapat perhatian serius agar program pemberdayaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Dampak Pemberdayaan Terhadap Ekonomi Keluarga

Salah satu tujuan utama dari program pemberdayaan di Desa Kupa adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga nelayan, sehingga tema ini menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Program ini dirancang dengan harapan agar nelayan dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka secara bertahap. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat konsensus di antara pihak pemerintah desa, penyuluh perikanan, dan nelayan bahwa program ini memberikan dampak ekonomi yang positif, meskipun belum menyeluruh dan masih berlangsung secara bertahap.

Pemerintah desa menyatakan bahwa beberapa keluarga nelayan telah mengalami peningkatan pendapatan sebagai hasil dari program ini, walaupun dampaknya belum terasa secara signifikan di semua rumah tangga nelayan.

⁶⁰ Hamuddin, Nelayan, Wawancara 19 Juli 2024

⁶¹ Guntur, Nelayan, Wawancara 19 Juli 2024

“Kami berharap dengan adanya program ini, pendapatan nelayan dapat meningkat secara bertahap, meskipun hasilnya belum langsung terlihat di semua keluarga,” ujar salah satu pejabat desa.⁶²

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berharap dampak program ini dapat dirasakan lebih luas seiring waktu, dengan asumsi bahwa program ini dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi seluruh keluarga nelayan yang aktif berpartisipasi.

Dari perspektif penyuluh perikanan, dampak positif program ini mulai terlihat terutama pada nelayan yang secara rutin menggunakan alat dan teknik baru yang diperkenalkan dalam pelatihan.

*“Dampak ekonominya memang mulai terasa di beberapa keluarga nelayan yang sudah rutin menggunakan alat dan teknik baru”*⁶³

kata seorang penyuluh perikanan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kesungguhan dan keterlibatan aktif nelayan dalam memanfaatkan pelatihan dan menerapkan teknologi baru.

Beberapa nelayan juga melaporkan adanya peningkatan penghasilan, meskipun jumlahnya belum besar.

*“Alhamdulillah, ada peningkatan pendapatan setelah kami mendapat alat dan pelatihan. Bisa sedikit membantu biaya sehari-hari keluarga,”*⁶⁴

ungkap seorang nelayan. Ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi, walau terbatas, sudah dirasakan dalam bentuk tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Nelayan juga mengungkapkan harapan agar program ini dapat terus berlanjut dan meluas sehingga lebih banyak nelayan bisa merasakan manfaat ekonominya.

⁶² Suardi Haruna, Kepala, Wawancara di Desa Kupa, 17 Juli 2024.

⁶³ Tamrin, Penyuluh Perikanan, Wawancara di Dusun Labuange, 17 Juli 2024

⁶⁴ Hamuddin, Nelayan, Wawancara, 19 Juli 2024

“Program ini memang ada manfaatnya, walaupun belum besar, tapi sudah mulai terasa,” kata nelayan lainnya.⁶⁵

Secara keseluruhan, konsistensi data dari ketiga sumber ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa memberikan dampak ekonomi positif yang bertahap. Dampak tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif nelayan dalam mengikuti program dan mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh, serta pada dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa dan penyuluh perikanan. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan pendampingan dalam program ini sangat penting agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh keluarga nelayan.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa, khususnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, temuan penelitian dapat dibahas melalui beberapa aspek, yaitu jenis program pemberdayaan yang dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap ekonomi keluarga nelayan.

1. Program Pemberdayaan Nelayan

Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan penyuluh perikanan menunjukkan bahwa program pemberdayaan di Desa Kupa terdiri dari pemberian bantuan alat tangkap, mesin perahu, serta pelatihan teknis dan kewirausahaan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas produktif nelayan agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi keluarga mereka.

Bantuan ini memberikan dampak langsung terhadap produktivitas nelayan. Dengan jaring baru, nelayan mampu menangkap ikan dengan hasil yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Mesin katinting memungkinkan akses ke daerah

⁶⁵ Guntur, Nelayan, Wawancara, 19 Juli 2024

penangkapan yang sebelumnya tidak terjangkau, sehingga meningkatkan potensi tangkapan harian.

Distribusi bantuan dilakukan secara bergiliran dan bergantung pada pengajuan proposal oleh kelompok nelayan. Sistem ini memunculkan keterbatasan akses, terutama bagi nelayan yang belum terorganisir atau memiliki kendala dalam proses administratif. Selain itu, bantuan yang bersifat top-down ini kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik nelayan di lapangan, sehingga dampaknya tidak sepenuhnya optimal.

Pelaksanaan program ini selaras dengan pandangan Mardikanto tentang pemberdayaan, yang mencakup peningkatan kapasitas individu dan kolektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Program yang dirancang oleh pemerintah desa mencakup unsur-unsur pemberdayaan, seperti peningkatan keterampilan dan pembentukan kelompok nelayan. Pembentukan kelompok nelayan bertujuan agar para nelayan dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman, yang pada akhirnya dapat memperkuat jaringan sosial dan kemampuan untuk menghadapi tantangan bersama.

Mardikanto menjelaskan pemberdayaan sebagai proses yang melibatkan peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya dan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan juga mencakup penguatan kapasitas, kesadaran, dan pengaruh dalam mengelola kehidupan mereka sendiri serta mempengaruhi kebijakan yang ada. Dalam konteks penelitian di Desa Kupa, pemberdayaan nelayan dapat dilihat dari beberapa elemen:

1. **Peningkatan kapasitas melalui pelatihan:** Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara, penyuluh perikanan memberikan pelatihan mengenai penggunaan alat tangkap dan teknik perikanan yang efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan Mardikanto yang menekankan peningkatan

kemampuan nelayan untuk mengelola sumber daya perikanan secara lebih efisien dan produktif.

2. **Akses terhadap sumber daya:** Pemberian alat tangkap dan mesin perahu oleh pemerintah desa merupakan salah satu bentuk akses terhadap sumber daya yang dapat memperkuat posisi nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan mereka. Akses terhadap teknologi dan peralatan modern menjadi salah satu faktor utama dalam pemberdayaan menurut Mardikanto.
3. **Kesadaran dan partisipasi:** Pemberdayaan juga mencakup peningkatan kesadaran nelayan akan pentingnya perubahan teknik perikanan. Namun, dalam wawancara, beberapa nelayan menunjukkan ketidakinginan untuk mengadopsi teknologi baru, yang menjadi hambatan dalam

Namun, pelaksanaan program ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya, terutama dari segi anggaran, yang menghambat pemberian alat tangkap secara merata kepada seluruh nelayan. Hal ini menyebabkan manfaat yang dirasakan oleh nelayan tidak merata, sehingga tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh masih belum sepenuhnya tercapai. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Plangiten et al. (2020), pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan spesifik komunitas dapat meningkatkan efektivitas program, tetapi dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar program dapat berdampak luas.⁶⁶

Pelaksanaan program ini juga diwarnai oleh strategi pemberdayaan berbasis partisipasi, di mana pemerintah desa berusaha melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi Paulo Freire, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan program yang menyentuh kehidupan mereka. Keterlibatan

⁶⁶ Raldy Chevien A. Dareno, Lengkong, and Plangiten, "Pengaruh Pemerdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Karekon Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung."

nelayan dalam perencanaan program diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi aktif, meskipun dalam praktiknya, partisipasi tersebut masih terbatas pada beberapa individu yang lebih aktif dalam kelompok.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program

Hambatan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Faktor Eksternal

1. **Keterbatasan anggaran:** Alokasi dana yang terbatas mengakibatkan bantuan tidak dapat diberikan secara merata kepada semua nelayan. Dalam beberapa kasus, distribusi bantuan terasa tidak adil karena hanya kelompok tertentu yang mendapatkan akses.
2. **Akses pasar:** Nelayan mengalami kesulitan menjual hasil tangkapan dengan harga yang layak. Terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas membuat nelayan tidak dapat memaksimalkan hasil tangkapan mereka secara ekonomi.

b. Faktor Internal

1. **Kurangnya partisipasi nelayan:** Jadwal melaut yang padat membuat nelayan sulit menghadiri pelatihan secara penuh. Hal ini mengurangi efektivitas transfer pengetahuan dalam program pelatihan.
2. **Adaptasi teknologi:** Beberapa nelayan merasa kesulitan menggunakan peralatan baru yang diperkenalkan melalui program bantuan. Ketidakbiasaan ini membutuhkan waktu dan pendampingan yang intensif agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam proses implementasinya, beberapa kendala utama dihadapi oleh pemerintah desa dan penyuluh perikanan, seperti keterbatasan anggaran, sulitnya akses pasar, dan rendahnya keterlibatan beberapa nelayan dalam pelatihan.

Keterbatasan anggaran membuat distribusi bantuan alat tangkap tidak merata, sehingga beberapa nelayan merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari program. Selain itu, akses pasar yang terbatas mengakibatkan hasil tangkapan nelayan sulit dijual dengan harga yang layak, terutama karena desa terletak jauh dari pusat ekonomi, yang meningkatkan biaya transportasi dan logistik.

Kendala dalam akses pasar ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan akses ke jaringan distribusi yang lebih luas. Ini sejalan dengan temuan Irfan Makhopa (2019),⁶⁷ yang menunjukkan bahwa hambatan akses pasar adalah salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Kurangnya infrastruktur mengakibatkan nelayan lebih bergantung pada pengepul yang memberikan harga lebih rendah, yang berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Selain itu, waktu yang terbatas bagi nelayan untuk mengikuti pelatihan menjadi kendala sosial yang perlu diperhatikan. Banyak nelayan yang harus melaut hampir setiap hari sebagai sumber penghidupan utama, sehingga mereka sulit meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan kelompok lainnya. Kendala ini mengacu pada hambatan kultural yang seringkali diabaikan dalam program pemberdayaan. Dalam pandangan Mardikanto, kendala sosial dan kultural seperti ini memerlukan pendekatan fleksibel dari pihak penyelenggara program, misalnya dengan menyediakan pelatihan pada waktu yang sesuai bagi nelayan.

3. Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Ekonomi Keluarga Nelayan

Dampak ekonomi dari program pemberdayaan ini mulai dirasakan oleh sebagian nelayan, khususnya mereka yang menerima alat tangkap dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan. Beberapa nelayan melaporkan adanya peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan setelah menggunakan alat tangkap

⁶⁷ Makhopa, "Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang."

baru dan menerapkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan. Dampak ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.

Dampak program pemberdayaan terhadap ekonomi keluarga nelayan mulai dirasakan meskipun belum sepenuhnya merata. Temuan menunjukkan bahwa:

- **Peningkatan produktivitas:** Bantuan alat tangkap seperti jaring dan mesin katinting memungkinkan nelayan menangkap ikan dengan lebih efisien, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan harian.
- **Diversifikasi pendapatan:** Pelatihan pengolahan hasil laut membuka peluang bagi keluarga nelayan untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari produk bernilai tambah. Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik bagi keluarga nelayan.

Namun, karena dampak ekonomi belum dirasakan merata, penting untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian hasil program. Program pemberdayaan yang berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Suwandi dan Prihatin (2020), memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan konsistensi dalam pelaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan⁶⁸. Di Desa Kupa, partisipasi aktif nelayan dalam program masih beragam, dengan beberapa nelayan yang kurang terlibat karena keterbatasan waktu atau persepsi yang belum yakin terhadap manfaat program.

Dampak ekonomi dari program pemberdayaan ini mulai dirasakan oleh sebagian nelayan, khususnya mereka yang menerima alat tangkap dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan. Beberapa nelayan melaporkan adanya peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan setelah menggunakan alat tangkap

⁶⁸ Suwandi and Prihatin, "Membangun Keberdayaan Nelayan : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui ' Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra ' Di Jepara , Indonesia." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2020.

baru dan menerapkan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan. Dampak ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.

Sebagai contoh, salah seorang nelayan, Bapak Hamuddin, mengungkapkan, *"Saya dapat bantuan jaring karena jaring yang sering saya pakai sudah banyak robeknya, sudah tidak bisa diperbaiki, dan setelah mendapat bantuan tersebut bisa membantu kami dalam menangkap ikan."* (Wawancara, 19 Juli 2024). Pernyataan ini mencerminkan peningkatan produktivitas berkat bantuan alat tangkap.

Diversifikasi pendapatan menjadi salah satu dampak positif dari pelatihan yang diberikan. Pelatihan pengolahan hasil laut membuka peluang bagi keluarga nelayan untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari produk bernilai tambah. Kepala Desa Kupa menyatakan, *"Pemerintah desa sangat berkomitmen dalam mendukung program pelatihan untuk masyarakat nelayan. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas perikanan dan penyuluh perikanan, untuk memastikan bahwa nelayan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka."* (Wawancara, 17 Juli 2024).

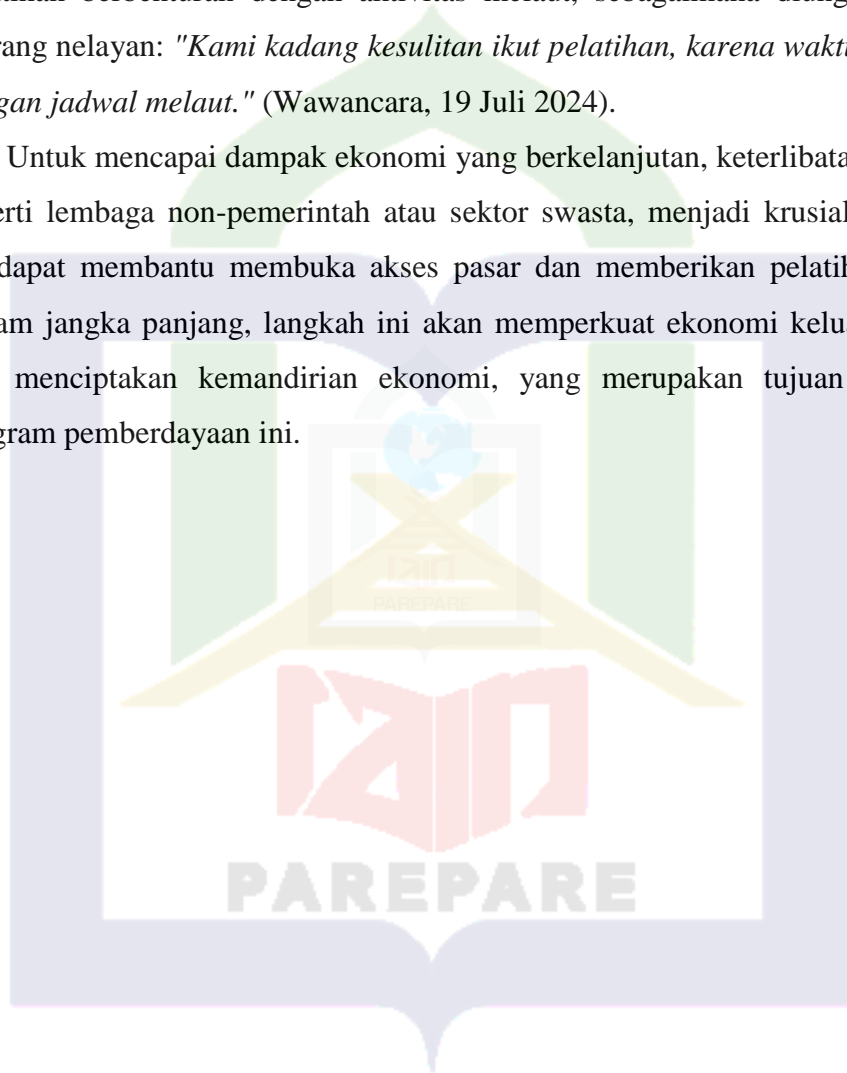
Dampak positif lain juga dirasakan oleh Bapak Guntur yang menerima mesin katinting. Ia menjelaskan, *"Saya hanya mendapatkan mesin katinting saja dari pak desa. Kalau ada mesin katinting, saya bisa mencari ikan sampai ke tempat yang lebih jauh sehingga saya bisa menemukan tempat-tempat yang ikannya banyak."* (Wawancara, 19 Juli 2024). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana bantuan alat tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga memperluas jangkauan nelayan dalam mencari ikan.

Namun, dampak ekonomi belum dirasakan secara merata. Beberapa nelayan menghadapi kendala, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tamrin, penyuluh perikanan Desa Kupa: *"Selama ini bantuan yang diberikan sangat terbatas, masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan."* (Wawancara, 17 Juli 2024).

Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap distribusi bantuan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak nelayan.

Faktor lain yang memengaruhi distribusi manfaat adalah tingkat partisipasi nelayan dalam pelatihan. Sebagian nelayan kurang berpartisipasi karena jadwal pelatihan berbenturan dengan aktivitas melaut, sebagaimana diungkapkan oleh seorang nelayan: *"Kami kadang kesulitan ikut pelatihan, karena waktunya bentrok dengan jadwal melaut."* (Wawancara, 19 Juli 2024).

Untuk mencapai dampak ekonomi yang berkelanjutan, keterlibatan pihak luar, seperti lembaga non-pemerintah atau sektor swasta, menjadi krusial. Kolaborasi ini dapat membantu membuka akses pasar dan memberikan pelatihan lanjutan. Dalam jangka panjang, langkah ini akan memperkuat ekonomi keluarga nelayan dan menciptakan kemandirian ekonomi, yang merupakan tujuan utama dari program pemberdayaan ini.



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, memberikan implikasi temuan bagi pihak-pihak terkait, membahas keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, serta memberikan saran-saran yang relevan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa. Penutup ini diharapkan dapat memberikan panduan dan inspirasi bagi pemerintah desa, penyuluh perikanan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun program telah berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan melalui bantuan alat tangkap dan pelatihan, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Dengan adanya peningkatan dukungan, baik dari segi anggaran, pelatihan, maupun perluasan jaringan pasar, diharapkan program pemberdayaan ini dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, program pemberdayaan yang berhasil adalah program yang tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Untuk itu, keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, penyuluh, mitra eksternal, dan nelayan itu sendiri, sangat penting agar program ini dapat terus berkembang dan menjadi model bagi pemberdayaan masyarakat pesisir di daerah lainnya.

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada analisis program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kupa yang bertujuan meningkatkan taraf ekonomi keluarga nelayan. Kesimpulan utama dari penelitian ini dapat diringkas dalam tiga aspek berikut:

1. Rancangan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Pemerintah Desa Kupa merancang program pemberdayaan dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan, pelatihan teknis, untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi nelayan. Program ini dilaksanakan melalui tahap perencanaan yang melibatkan masukan dari masyarakat nelayan, meskipun intensitas partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Pelaksanaan program dilakukan bertahap, dengan prioritas diberikan pada kelompok nelayan yang dianggap paling membutuhkan. Bantuan alat tangkap dirancang untuk meningkatkan hasil tangkapan, sementara pelatihan teknis dan pengelolaan usaha dimaksudkan agar nelayan dapat memaksimalkan pemanfaatan bantuan yang diterima.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Program

Meskipun telah diupayakan secara maksimal, implementasi program pemberdayaan ini menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada distribusi bantuan yang tidak selalu merata. Selain itu, banyak nelayan mengaku sulit mengikuti pelatihan karena jadwal yang tidak selalu sesuai dengan waktu kerja mereka. Faktor lain seperti akses pasar yang masih terbatas membuat nelayan kesulitan dalam menjual hasil tangkapan dengan harga yang optimal. Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas program secara keseluruhan dan mengurangi dampak yang dapat dirasakan oleh nelayan.

3. Dampak terhadap Ekonomi Keluarga Nelayan

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian nelayan yang aktif berpartisipasi dalam program merasakan adanya peningkatan hasil tangkapan

dan pendapatan. Namun, dampak positif ini belum dirasakan secara merata, terutama karena ada nelayan yang belum mendapatkan bantuan secara langsung atau memiliki keterbatasan dalam mengakses pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dampaknya masih bersifat parsial dan perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak nelayan di Desa Kupa.

B. Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan, beberapa saran berikut diajukan untuk peningkatan program pemberdayaan di Desa Kupa:

1. **Optimalisasi Anggaran dan Perluasan Jaringan Pasar:** Pemerintah desa disarankan untuk mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat atau melalui kemitraan dengan organisasi eksternal. Selain itu, jaringan pasar yang lebih luas dapat membantu nelayan memperoleh harga jual yang lebih baik untuk hasil tangkapan mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.
2. **Pelatihan yang Berkelanjutan dan Fleksibel:** Penyuluh perikanan dan pemerintah desa disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan yang lebih fleksibel sesuai dengan waktu kerja nelayan serta menyusun materi pelatihan yang mencakup keterampilan tambahan seperti pemasaran dan kewirausahaan. Hal ini bertujuan agar pelatihan lebih mudah diakses dan relevan bagi nelayan.
3. **Studi Lanjutan:** Disarankan adanya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi program pemberdayaan terhadap pendapatan nelayan. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut tentang model pemberdayaan berbasis partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." JAKARTA: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2022.

Jurnal

Indriani, Claudia, Sulaiman Asang, and Amril Hans. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 1, no. 1 (2021): 57–67

Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2019): 88.

Raldy Chevien A. Dareno, Florence D.J Lengkong, and Novva N. Plangiten. "Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Karekon Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung." *Jurnal Administrasi Publik* 5(75) (2019).

Suwandi, Maygsi Aldian, and Silverius Djuni Prihatin. "Membangun Keberdayaan Nelayan : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui ' Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra ' Di Jepara , Indonesia." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol.10, No (2020).

Buku

Abd Hadi, Asrori dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.

Andika, Pundarika Vidya. "Mengenal Arnstein's Ladder Dalam Menata Partisipasi Publik." IAP2 Indonesia, 2022.

Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi*. Jawa Timur: FAM Publishing, 2013.

Bahua, Mohammad Ikbil. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca*. Vol. 1.

- Makassar, 2018.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020..
- Kusnadi, Dkk. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: PSKP, 2007.
- Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama), 2019.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan Panduan Bagi Praktisi Lapangan Diterjemahkan Matheos Nalle*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 1999.
- Muhammad Kamal Zubair, Dkk. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative, 2023.
- Penyusun, Tim. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kupa*, 2017.
- Pratama, Oki. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan Dan Perikanan Indonesia.” Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2020.
- Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Suaib. *Relasi Antar Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Sufi. *Strategi Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Muara Batu*. Unimal Press, 2019.
- Suhaimi, Ahmad. *Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama), 2016.
- T, Mardikanto, and Poerwoko S. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*

Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012.

Ulum, Mochamad Chazieul, and Niken Lastiti Veri Anggaini. *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Malang: UB Press, 2020.

Skripsi

Makhopa, Irfan. “Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang,” 2020.

Website

Indraswari, Debora Laksmi. “Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir Yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan.” In *Kompas.Id*. Kompas.id, 2023.

“Kamus Hukum Indonesia,” n.d. <https://www.kamus-hukum.com/definisi/9797/Nelayan>.

Pratama, Oki. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan Dan Perikanan Indonesia.” Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2020.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Digital Ocean, 2023. <https://kbbi.web.id/nelayan>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telp: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1763/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2023

31 Agustus 2023

Hal : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.
2. Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I.

Di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

Nama : RISMAYANTI
NIM : 2020203870231005
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
KELUARGA DI DESA KUPA KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,

Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP.19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2450/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 Juli 2024

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Barru
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Barru
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RISMAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: BARRU, 25 Maret 2003
NIM	: 2020203870231005
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN LABUANGE RT:02, DESA KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru
<http://izinonline.barrukab.go.id> e-mail : barrudpmtsp@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 18 Juli 2024

Nomor : 410/IP/DPMPTSP/VII/2024
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Kupa Kec. Mallusetasi
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Nomor : B-2450/In.39/FUAD.03/PP.00.09/07/2024 tanggal, 15 Juli 2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini

Nama : Rismayanti
Nomor Pokok : 2020203870231005
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Labuange Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 18 Juni 2024 s/d 18 Agustus 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru,
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan),
2. Kepala Bappeditbangda Kab. Barru,
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru,
4. Dekan Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN,
5. Mahasiswi yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA KUPA

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. ...

Kode Pos 90753

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.1.10/ 660 /DESA KUPA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASNI, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Desa Kupa

Menerangkan Bahwa :

Nama : **RISMAYANTI**
NIM : 2020203870231005
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Alamat : Labuange, Desa Kupa
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Dusun Labuange, Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru terhitung dari tanggal **18 Juni 2024 s/d 18 Agustus 2024** dalam rangka penyusunan *skripsi* dengan judul :

" PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU "

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupa, 25 November 2024

A.n Kepala Desa Kupa
Sekretaris,



	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p align="center">FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p align="center">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> <p align="center">PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : RISMAYANTI
 NIM : 2020203870231005
 FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
 JUDUL : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
 DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI
 KELUARGA NELAYAN DI DESA KUPA
 KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
 BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pemerintah Desa

1. Upaya Pemberdayaan

- a. Apa saja program pemberdayaan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa untuk masyarakat nelayan di Desa Kupa?
- b. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut?
- c. Apa tujuan utama dari program-program ini, terutama dalam konteks peningkatan ekonomi keluarga nelayan?

2. Faktor Penghambat

- a. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan program pemberdayaan nelayan?
- b. Bagaimana pandangan pemerintah desa mengenai partisipasi nelayan dalam program-program ini? Apakah nelayan terlibat aktif?
- c. Adakah dukungan atau kendala dari pihak lain (misalnya dari pemerintah daerah atau lembaga lain) yang memengaruhi pelaksanaan program?

3. Dampak Pemberdayaan

- a. Menurut Anda, sejauh mana program-program pemberdayaan ini berhasil meningkatkan ekonomi keluarga nelayan?
- b. Apakah ada perubahan signifikan yang terlihat pada kondisi sosial-ekonomi nelayan setelah program ini dijalankan?

Pedoman Wawancara untuk Penyuluh Perikanan

1. Upaya Pemberdayaan

- a. Apa saja bentuk pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada nelayan melalui program pemberdayaan?
- b. Bagaimana respons nelayan terhadap pelatihan atau bantuan yang diberikan?
- c. Bagaimana peran penyuluh dalam memastikan program pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan?

2. Faktor Penghambat

- a. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam melatih atau mendampingi nelayan?
- b. Menurut Anda, apakah ada keterbatasan dari segi keterampilan atau sumber daya yang dimiliki nelayan yang menjadi penghambat keberhasilan program?
- c. Bagaimana tingkat keterlibatan nelayan dalam program pemberdayaan? Apakah mereka antusias atau cenderung pasif?

3. Dampak Pemberdayaan

- a. Berdasarkan pengamatan Anda, apa saja dampak yang dialami nelayan setelah mengikuti program pemberdayaan?
- b. Apakah ada perubahan pada keterampilan atau cara mereka bekerja setelah program ini dijalankan?

Pedoman Wawancara untuk Nelayan

1. Upaya Pemberdayaan

- a. Apakah Anda pernah mengikuti program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau penyuluh perikanan? Jika ya, program apa saja?
- b. Bagaimana pandangan Anda mengenai pelatihan atau bantuan yang diberikan? Apakah program tersebut membantu dalam pekerjaan Anda?
- c. Apa harapan Anda dari program-program pemberdayaan tersebut?

2. Faktor Penghambat

- a. Apakah ada kesulitan atau kendala yang Anda rasakan dalam mengikuti program-program tersebut?
- b. Menurut Anda, apakah program-program ini sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai nelayan? Mengapa?
- c. Apakah Anda merasa dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program? Jika tidak, apa yang menjadi penghalang?

3. Dampak Pemberdayaan

- a. Apakah Anda merasa ada perubahan dalam kondisi ekonomi keluarga setelah mengikuti program pemberdayaan?
- b. Bagaimana program tersebut memengaruhi pendapatan atau pekerjaan Anda sehari-hari?
- c. Apa manfaat terbesar yang Anda rasakan dari program pemberdayaan yang pernah diikuti?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Nelayan



KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PERIKANAN TANGKAP
“ SIPATOKKONG ”
Dusun Buaha Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Nomor : 01/KUB-STG/II/2022
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal. : Permohonan Bantuan
Sarana Prasarana Penangkapan Ikan

Kepada Yth.
Bapak Bupati Barru
Cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru
di,
Makassar.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat

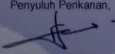
Untuk mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Ekonomi bagi masyarakat secara umum dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan dan Ketahanan Pangan demi tercapainya kesejahteraan nasional pada umumnya dan kesejahteraan anggota kelompok beserta keluarganya pada khususnya.

Sehubungan dengan adanya program Pemerintah berupa bantuan Sarana Penangkapan Ikan khususnya Nelayan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha Perikanan di pedesaan, maka bersama ini dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap “ Sipatokkong ” mengajukan permohonan bantuan sarana Penangkapan ikan yang sangat kami butuhkan di wilayah Desa kami. Sebagai bahan pertimbangan Bapak **Proposal** usaha terlampir.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Kupa, 11 Februari 2022.

Pengurus KUB. Sipatokkong:

Ketua, IBRAHIM.C	Sekretaris, SYARIFUDDIN
Penyuluh Perikanan,  TAMRIN, S.PI NIP. 19620602 198603 1 026	Mengetahui : Kepala Desa Kupa, SUARDI HARUNA, SE

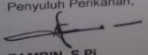
Proposal Nelayan

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PERIKANAN TANGKAP
“ SIPATOKKONG ”
Dusun Buaha Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) SIPATOKKONG

KETUA	: IBRAHIM
SEKRETARIS	: SYARIFUDDIN
BENDAHARA	: MUHAJIRIN
ANGGOTA	: 1. LA HARI
	2. ASTOBIN
	3. MUHAMMAD TAHIR
	4. ILOLOH
	5. NURDI
	6. BASIR
	7. HANAFI
	8. HAMUDDIN
	9. AMIRUDDIN
	10. AMIR
	11. ASRI
	12. LASAPPE
	13. RUSLAN
	14. MANSUR

KUB. Sipatokkong,

Ketua, IBRAHIM.C	Sekretaris, SYARIFUDDIN
Penyuluh Perikanan,  TAMRIN, S.PI NIP. 19620602 198603 1 026	Mengetahui : Kepala Desa Kupa, SUARDI HARUNA, SE

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Rismayanti, anak pertama dari pasangan Harisman dan Fatmawati dan mempunyai 1 saudara perempuan. Penulis lahir di Dusun Labuange, Pada tanggal 25 Maret 2003, dan sampai sekarang penulis tinggal di Dusun Labuange Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak di Labuange, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Labuange pada tahun 2009-2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Parepare, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Parepare. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikannya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada tahun 2020. Selama masa studi, penulis cukup aktif mengikuti organisasi internal kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (HMPS-PMI) dengan menjabat sebagai Bendahara Umum.